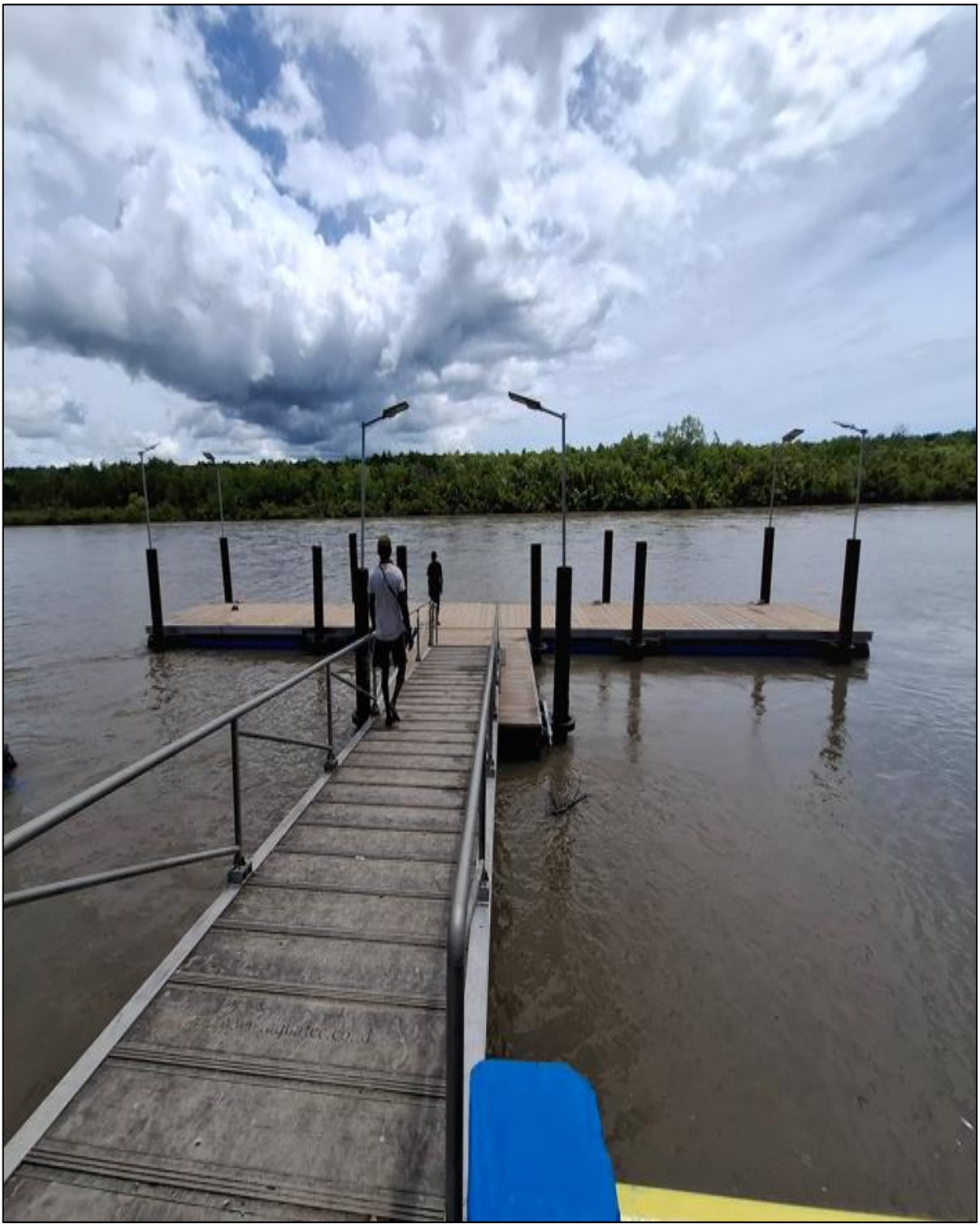
PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG ATAPO DISTRIK MIMIKA BARAT TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Atapo Distrik Mimika Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Barat beserta seluruh staf, Kepala Kampung Atapo dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupatem Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Atapo ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Atapo dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Atapo bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Atapo dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Atapo ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Atapo.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Atapo ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Atapo dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Atapo,

Gabriel Matamoa

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Atapo** di wilayah Distrik Mimika Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Atapo di Distrik Mimika Barat yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Atapo ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Kepala Distrik Mimika Barat,

Christian Warinussy, S.Sos

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Atapo, Distrik Mimika Barat** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Barat beserta jajaran, Kepala Kampung Atapo bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Atapo yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH

SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan "Membangun dari kampung ke kota", maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Atapo** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan **“**Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Atapo ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Penyusun ii
Kata Pengantar Kepala Kampung iii
Kata Pengantar Kepala Distrik iv
Sambutan Kepala Dinas PMK v
Sambutan Bupati Mimika vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii

Bagian I. **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 3
Bagian II. **METODOLOGI** 5
Bagian III. **PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG**..... 10
A. Keadaan Wilayah Kampung 10
1. Sejarah 10
2. Keadaan Wilayah 17
B. Keadaan Perumahan 21
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah 21
2. Pola Permukiman 23
3. Kepemilikan Rumah 25
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar 25
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga 26
6. Kondisi Lingkungan Permukiman 27
C. Kependudukan 28
1. Suku-suku di Kampung 28
2. Nilai dan Kearifan Lokal 30
3. Keadaan Penduduk 31
4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk 38
D. Pendidikan 40
1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan 40
2. Kelembagaan Pendidikan 43
3. Keadaan Guru dan Murid 45
4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar 46
5. Pendidikan NonFormal 47
E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana 47

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit …… 47
2. Kesehatan ……. 49
3. Gizi …….. 50
4. Keluarga Berencana ……. 52
F. Ekonomi Masyarakat 53
1. Aktivitas Penduduk …….. 53
2. Kepemilikan Modal ……. 53
3. Kelembagaan Ekonomi …… 54
4. Harga Barang dan Bahan Makanan ……. 56
5. Potensi dan Peluang Ekonomi …….. 58
6. Tingkat Kesejahteraan …….. 58
G. Keamanan dan Ketertiban 60
1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 60
2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 61
H. Kelembagaan Kampung 61
1. Lembaga pemerintah 61
2. Lembaga kemasyarakatan..... 63
3. Lembaga Politik 64
4. Lembaga Kamtibmas 64
I. Sarana dan Prasana 65
1. Transportasi dan Komunikasi …….. 65
2. Air Bersih dan Sanitasi ……. 67
3. Penerangan ……..... 68
4. Pendidikan ……... 69
5. Kesehatan ……. 70
6. Ekonomi ……... 71
7. Peribadatan …….. 73
8.Olahraga dan Rekreasi …….. 73
Bagian IV. **PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG** …….. 75
A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota 75
B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal 76
C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan 76
Bagian V. **PENUTUP** 78

Daftar Pustaka 79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Distribusi Kepala Keluarga Kampung Atapo menurut Jenis Rumah Tahun 2025……..... 23

Tabel 3.2 Distribusi Kepala Keluarga Kampung Atapo menurut Asal bantuan pembangunan Rumah Tahun 2025 24

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Umur Tahun 2025 33

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 35

Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Matapencaharian Tahun 2025 36

Tabel 3.6 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Agama Tahun 2025 38

Tabel 3.7 Keadaan Siswa dan Guru SD Negeri Kampung Atapo Tahun 2025 45

Tabel 3.8 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah Di Kampung Atapo Tahun 2025 57

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Atapo 75

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Atapo 76

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Atapo 77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Atapo 9

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Atapo 62

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Atapo 63

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni "Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif". Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan "Membangun dari Kampung ke Kota", dengan pendekatan "Membangun Kampung Rasa Kota". Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai "Gerbang Emas", yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
   a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
      Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
   b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
      Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
   c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
      Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
   d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
      Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
   e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat
   a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

      Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

   b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

      Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

   c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

      Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

   d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

      Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

   e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

      Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Atapo dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Atapo menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

   Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

   Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

   Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Atapo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Atapo meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
   b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
   c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Barat.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

   Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Atapo dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

   Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika**.** Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

   Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Atapo.

2. Data primer
   a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
   b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

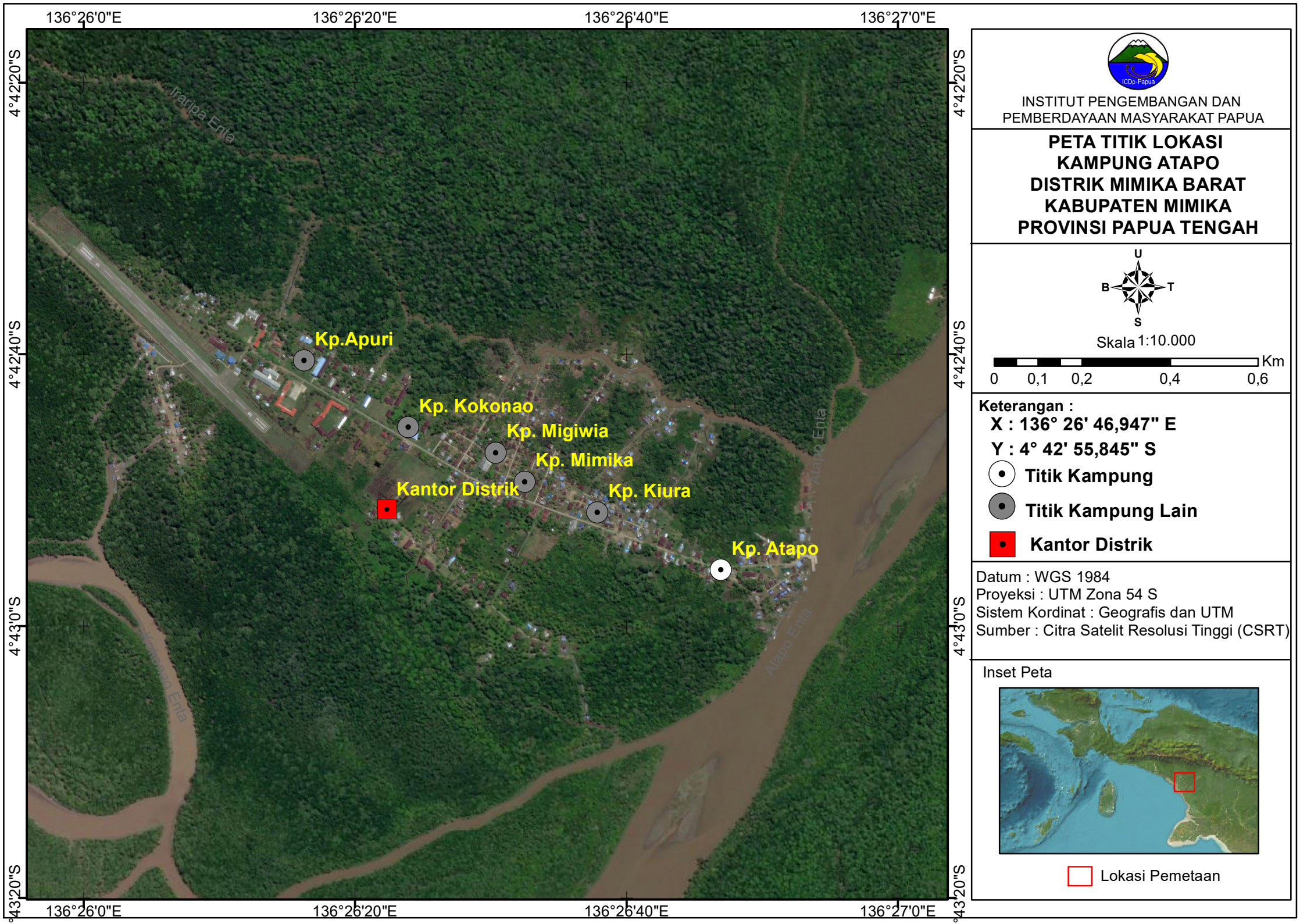
Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Atapo.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Atapo dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Atapo, Distrik Mimika Barat, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

PETA TITIK LOKASI KAMPUNG ATAPO DISTRIK MIMIKA BARAT KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

U
B T
S

Skala 1:10.000

0 0,1 0,2 0,4 0,6 Km

Keterangan :

X : 136° 26' 46,947" E

Y : 4° 42' 55,845" S

- **Titik Kampung**
- **Titik Kampung Lain**
- **Kantor Distrik**

Datum : WGS 1984
Proyeksi : UTM Zona 54 S
Sistem Kordinat : Geografis dan UTM
Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta

Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Kampung Atapo merupakan salah satu kampung baru di wilayah pesisir Mimika yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Menurut penuturan para tetua adat, leluhur masyarakat Atapo pada mulanya bermukim di kawasan pesisir Pantai Kokonao. Mereka berasal dari berbagai kampung dan latar belakang ras yang berbeda, kemudian menetap dan bergabung dengan masyarakat di Kampung Kiyura, Mimika, Migiwiya dan Kokonao. Pada masa itu seluruh wilayah berada dalam struktur pemerintahan Kampung Kokonao di bawah kepemimpinan Yohanis Nakiyaya (1975-1988).

Perkembangan administrasi wilayah mulai tampak pada tahun 1991 ketika Kampung Kokonao dimekarkan menjadi empat kampung, yakni Kampung Kokonao, Migiwiya, Mimika dan Kiyura. Dalam pemekaran tersebut, masyarakat Atapo tercatat sebagai bagian dari Kampung Kiyura. Kampung Kiyura kemudian dipimpin oleh Kepala Kampung pertama, Timotius Samin (1991-1998), dilanjutkan oleh Hironimus Mameyau (1998-2013).

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan pemerintahan, pada tahun 2013 dilakukan pemekaran Kampung Kiyura menjadi dua kampung, yaitu Kampung Kiyura dan Kampung Atapo. Sejak saat itu, Kampung Atapo resmi berdiri sebagai suatu pemerintahan kampung yang mandiri, dipimpin oleh kepala kampung pertama, Gabriel Matamoa (2013-2019), yang kemudian kembali terpilih untuk masa jabatan kedua (2019-2024).



Pintu Gerbang Kampung Atapo (dok.ippm)

Nama **"Atapo"** berasal dari penyebutan misionaris Katolik yang berarti **"Tempat Persinggahan"**. Penamaan ini mengacu pada sejarah awal para leluhur yang bermukim di pesisir Pantai Kokonao, sebuah kawasan yang dikenal sebagai

pelabuhan tradisional tempat masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Para leluhur yang datang sebagai pendatang menemukan kenyamanan hidup di wilayah tersebut karena melimpahnya hasil laut serta kemudahan berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Seiring waktu, nama Atapo tidak mengalami perubahan, tetapi maknanya semakin menguat sebagai identitas kolektif masyarakat. Nama ini bukan hanya mencerminkan lokasi awal permukiman, tetapi juga menggambarkan karakter masyarakatnya yang terbuka dalam menerima berbagai dinamika pembangunan, pekerja keras, serta dekat dengan aktivitas perikanan dan perdagangan. Setelah pemekaran kampung pada tahun 2013, nama Atapo secara resmi digunakan sebagai identitas pemerintahan kampung baru yang memiliki otonomi sendiri.

b. Struktur sosial awal

Pembentukan komunitas awal Kampung Atapo berakar dari keberadaan Leander Akimuri yang memulai membangun rumah, sebagai menjadi perintis permukiman di pesisir Kokonao secara khusus wilayah Atapo. Para leluhur berasal dari berbagai kampung dan latar belakang kekerabatan yang berbeda, namun mereka membentuk satu komunitas melalui hubungan pernikahan, pertukaran sosial, serta pengalaman hidup bersama di wilayah pesisir. Interaksi inilah yang menumbuhkan solidaritas di antara kelompok keluarga tersebut, sehingga mereka mampu membangun komunitas yang stabil sebelum kemudian bergabung dalam struktur pemerintahan Kampung Kokonao pada masa awal.

Seiring bertambahnya jumlah keluarga, jaringan kekerabatan di antara marga semakin berkembang dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Mereka berbagi peran dalam kegiatan ekonomi, adat dan kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk satu kesatuan komunitas yang harmonis walaupun terdiri dari latar belakang yang beragam. Perkembangan ini mencapai titik penting ketika masyarakat Atapo diakui sebagai bagian dari Kampung Kiyura pada pemekaran tahun 1991. Ketika kampung kembali dimekarkan pada tahun 2013, marga-marga perintis tersebut menjadi fondasi yang memperkuat identitas sosial Kampung Atapo sebagai kampung yang berdiri sendiri.

Pada masa awal, sebelum terbentuknya pemerintahan kampung yang formal, kepemimpinan masyarakat Atapo bertumpu pada tokoh-tokoh adat yang dihormati.

Para kepala marga seperti Akimuri, Matamoa, Ewakipiuta serta marga non Kamoro Mariyen dan Mirino memiliki peran sentral dalam menjaga hubungan kekerabatan, menyelesaikan perselisihan, serta mengatur pembagian ruang hunian dan lahan. Mereka menjadi penentu arah kehidupan komunitas dengan mengacu pada nilai adat leluhur yang diwariskan turun temurun, sehingga tercipta tatanan sosial yang jelas dan dihormati oleh seluruh anggota komunitas.

Selain kepemimpinan adat, kehadiran tokoh-tokoh agama turut membawa pengaruh penting bagi masyarakat Atapo. Perkembangan misi gereja di wilayah Mimika memperkenalkan nilai moral, kedisiplinan hidup serta semangat kebersamaan dalam komunitas. Dukungan tokoh agama ini melengkapi peran pemimpin adat sehingga Atapo berkembang sebagai komunitas yang kuat, teratur dan memiliki pedoman hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Pada saat masyarakat Atapo masih berada dalam struktur pemerintahan Kampung Kokonao dan kemudian menjadi bagian dari Kampung Kiyura, kepemimpinan adat tetap berjalan berdampingan dengan pemerintahan formal. Keseimbangan dua sistem kepemimpinan ini memperkuat kohesi sosial dan memudahkan proses transisi ketika Atapo ditetapkan sebagai kampung definitif pada tahun 2013. Di bawah kepemimpinan Kepala Kampung pertama, Bapak Gabriel Matamoa, masyarakat mulai membangun tata kelola kampung secara mandiri tanpa meninggalkan nilai adat yang telah menjadi landasan mereka.

Dalam kehidupan awal di pesisir Kokonao, masyarakat Atapo menerapkan pola permukiman yang mengikuti garis pantai guna memudahkan kerja kolektif dan akses terhadap sumber daya laut. Pemukiman yang berdekatan mencerminkan kuatnya hubungan antar keluarga dalam menjaga kehidupan bersama. Sistem hidup mereka sangat bergantung pada lingkungan pesisir melalui kegiatan menjaring ikan, udang dan menangkap kepiting, mengumpulkan hasil laut (siput dan tambelo), serta membuka kebun kecil untuk memenuhi kebutuhan pangan. Aktivitas meramu hasil hutan dan berburu dilakukan sesuai musim, sebagai pelengkap konsumsi rumah tangga. Prinsip gotong royong dan kerja bersama menjadi kekuatan utama masyarakat pada masa itu, memungkinkan mereka bertahan, berkembang dan

akhirnya memperoleh pengakuan sebagai kampung mandiri dengan identitas sosial yang kokoh.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Perkembangan kapasitas penduduk Kampung Atapo berlangsung seiring bertambahnya jumlah keluarga yang bermukim di wilayah pesisir Kokonao dan kemudian menjadi bagian dari Kampung Kiyura. Pada masa awal, kehidupan masyarakat masih berorientasi pada pola tradisional yang menekankan kerja kolektif, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, serta peran adat dalam mengatur hubungan sosial. Namun seiring meningkatnya interaksi dengan kampung-kampung lain dan masuknya pendidikan formal, terjadi perubahan gradual dalam cara pandang dan pola hidup masyarakat.

Proses pemekaran kampung pada tahun 1991 dan 2013 juga berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas penduduk. Akses yang lebih baik terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan menciptakan masyarakat yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Nilai budaya tetap dipertahankan, namun fleksibilitas dalam menerima inovasi baru semakin menguat. Hal ini terlihat dari pola pikir masyarakat yang semakin terbuka, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak, serta kemampuan mengelola kegiatan ekonomi yang lebih beragam.

Perubahan sosial di Kampung Atapo tidak dapat dilepaskan dari pengaruh eksternal, terutama kehadiran misi gereja Katolik yang menempatkan guru-guru dari Kei di wilayah Mimika. Tokoh-tokoh tersebut antara lain bermarga Saklil, Rahangiar, Wakanubun, Buswarin, Leisubun, Helyanan, Dumatubun, Maturbongs, Lesomar dan Renwarin, berperan penting membangun disiplin moral, memperkuat rasa kebersamaan, serta memperkenalkan pendidikan dan pelayanan sosial dasar. Melalui pendekatan spiritual dan pemberdayaan komunitas, gereja menjadi salah satu institusi yang membantu masyarakat menghadapi tantangan modernisasi.

Selain gereja, pengaruh pemerintah semakin terasa terutama sejak masa pemerintahan Kabupaten Fak-Fak dan kemudian Kabupaten Mimika. Program pembangunan seperti Respek yang masuk pada tahun 2003 membantu memperkuat kapasitas kampung melalui dukungan fasilitas publik, penguatan kelembagaan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pemerintah dalam proses

pemekaran kampung tahun 1991 dan 2013 juga memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Atapo untuk mengatur kehidupan mereka secara mandiri dan terstruktur.

Interaksi dengan masyarakat dari berbagai kampung di Kokonao turut memperkaya budaya Atapo. Hubungan dan pertukaran sosial, serta mobilitas penduduk di Kampung Atapo sebagai lokasi pelabuhan laut menjadikan masyarakat Atapo lebih terbuka dan mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal tanpa kehilangan identitas budaya lokal setempat.

Beberapa peristiwa penting turut membentuk perjalanan masyarakat Atapo menuju kondisi saat ini. Salah satu yang paling awal adalah pemukiman leluhur di pesisir Pantai Kokonao, yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya komunitas Atapo. Pada tahun 1983, masyarakat Atapo secara resmi tercatat bergabung dengan Kampung Kokonao, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Kabupaten Fak-Fak.

Peristiwa besar berikutnya terjadi pada tahun 1991 ketika Kampung Kokonao dimekarkan menjadi empat kampung. Dalam pemekaran itu, masyarakat Atapo menjadi bagian dari Kampung Kiyura. Fase ini menjadi momentum penting karena memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan menguatkan struktur sosial mereka.

Tahun 2003 ditandai dengan masuknya program Respek yang mendorong pembangunan fasilitas dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana pemberdayaan. Hal ini memperkuat kapasitas kampung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Pada tahun 2013, terjadi pemekaran penting lainnya yang melahirkan Kampung Atapo sebagai kampung mandiri. Peristiwa ini menjadi tonggak utama dalam sejarah Atapo karena membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun tata kelola sendiri dan memperkuat identitas kampung. Sejak saat itu, pembangunan fasilitas publik dan program pemerintah mulai berjalan lebih intensif dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat Atapo.

Sejak masa awal, masyarakat Atapo menggantungkan kehidupan pada aktivitas subsisten seperti menangkap ikan, meramu hasil alam, dan membuka kebun kecil untuk memenuhi kebutuhan harian. Sistem ekonomi tradisional ini

mencerminkan kedekatan mereka dengan lingkungan pesisir dan sumber daya alam.

Namun, seiring meningkatnya interaksi dengan kampung-kampung sekitar serta masuknya program pembangunan, masyarakat mulai mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih variatif. Aktivitas perdagangan mulai tumbuh, terutama melalui hubungan dagang dengan masyarakat Kokonao dan wilayah pesisir kabupaten Mimika. Perubahan ini semakin kuat setelah Atapo menjadi kampung mandiri pada tahun 2013, yang memungkinkan tumbuhnya usaha kecil, perdagangan hasil laut dan jasa transportasi lokal.

Transformasi ekonomi kampung Atapo kini berada dalam pola campuran, perpaduan antara kegiatan subsisten tradisional dan usaha ekonomi baru. Masyarakat tetap memelihara sumber pangan dari kebun dan laut, namun juga mulai memanfaatkan peluang ekonomi dari jasa buruh pelabuhan, serta keterlibatan dalam program pemerintah. Peralihan ini mencerminkan kapasitas adaptasi masyarakat kampung Atapo dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang semakin dinamis.

d. Nilai dan kearifan lokal

Norma adat dan ritual budaya masyarakat kampung Atapo berakar dari perjalanan leluhur mereka yang dahulu bermukim di pesisir Kokonao hingga kemudian bergabung dengan komunitas Kampung Kiyura pada pemekaran tahun 1991. Sejak masa awal itu, aturan adat menjadi pedoman utama untuk menjaga ketertiban, mengatur hubungan antar marga dan memastikan harmoni sosial. Upacara adat seperti syukur hasil laut, ritual membuka lahan baru, serta prosesi adat dalam pernikahan, kedukaan dan pesta kampung terus dipertahankan hingga sekarang. Struktur kepemimpinan tradisional yang dipimpin kepala marga dan tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai sekaligus penyelesai sengketa, sehingga masyarakat kampung Atapo tetap solid dan mampu melewati berbagai perubahan, termasuk proses menuju kampung definitif pada tahun 2013.

Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi fondasi penting dalam perkembangan komunitas masyarakat kampung Atapo dari masa ke masa. Tokoh adat menjaga kesinambungan tradisi, memastikan setiap keputusan sesuai nilai leluhur dan menjadi mitra pemerintah kampung dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, tokoh agama khususnya dari Gereja Katolik memberikan arahan moral, memperkuat solidaritas, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sinergi kedua unsur kepemimpinan ini menciptakan keseimbangan antara adat dan kekristenan, sehingga tata pemerintahan kampung dapat berjalan selaras, saling mendukung dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kolaborasi ini terbukti memperkuat identitas sosial kampung Atapo sebagai komunitas religius yang tetap teguh memegang budaya.

Kearifan tradisional masyarakat kampung Atapo tampak kuat dalam cara mereka mengelola tanah ulayat, wilayah sungai, hutan dan pesisir berdasarkan kesepakatan turun-temurun. Pembagian pemanfaatan wilayah mengikuti batas adat dua sungai besar di Distrik Mimika Barat yaitu Sungai Mimika dan Sungai Kapare dengan aturan bahwa kampung tertentu memiliki akses utama, sementara kampung Atapo, Apuri dan Aparuka dapat memanfaatkannya dengan izin pemilik dusun. Sistem sasi tradisional, seperti penggunaan pucuk kelapa atau daun sagu sebagai tanda larangan sementara di kebun atau lokasi berburu, menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Adapun wilayah sungai dan mangrove dikelola secara bersama sebagai ruang hidup kolektif tempat warga bebas menjaring ikan dan udang, memancing dan mengambil kepiting bakau. Solidaritas sosial berupa gotong royong juga menjadi kekuatan yang terus diwariskan, terlihat dalam pembangunan rumah, penyelenggaraan upacara adat, hingga saling menopang saat menghadapi situasi sulit. Seluruh kearifan ini tetap hidup dan menjadi pilar yang memperkokoh identitas Atapo sebagai kampung yang mandiri dan berakar kuat pada nilai leluhur.

e. Identitas kampung saat ini

Masyarakat Kampung Atapo memiliki identitas budaya yang kuat dan tetap terjaga dari generasi ke generasi. Bahasa ibu yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Mimika, yang menjadi pengikat sosial serta sarana pewarisan nilai-nilai lokal. Tradisi seni tari juga masih hidup, terutama melalui tarian Seka, yang biasa ditampilkan dalam berbagai acara adat, keagamaan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai simbol kebersamaan dan ungkapan kegembiraan. Dalam aspek kuliner, masyarakat Atapo mengandalkan bahan pangan lokal, khususnya sagu yang diolah menjadi beragam makanan tradisional dan menjadi bagian penting dari identitas gastronomi kampung.

Kampung Atapo mengusung motto **"Aimikamo"** yang berarti "mari kita membangun". Semboyan ini mencerminkan semangat kolektif masyarakat dalam memajukan kampung, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kesadaran bersama untuk terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah perkembangan Kampung Atapo menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan penguatan fungsi kampung sebagai kawasan pelabuhan. Keberadaan dermaga umum telah membuka akses yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi, pergerakkan barang dan interaksi antar wilayah. Pembangunan jembatan tambatan perahu pada tahun 2025 menjadi tonggak penting yang semakin memperlancar mobilitas penduduk, terutama dari kampung-kampung sekitar. Perkembangan ini bukan hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membentuk karakter kampung sebagai pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat perannya dalam jaringan transportasi air di wilayah setempat.

2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Atapo merupakan salah satu kampung di wilayah Distrik Mimika Barat, yang berada pada kawasan pesisir dengan karakter lingkungan geografis khas wilayah rawa dan sungai. Keberadaan kampung ini di pesisir menjadikan Atapo memiliki kedekatan ekologis dan budaya yang kuat dengan lingkungan laut, hutan mangrove, serta sungai-sungai besar yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sejak dahulu.

Secara administratif, Kampung Atapo berbatasan langsung dengan Kampung Kiyura dan Kampung Keakwa yang berada di Distrik Mimika Tengah. Kedekatan wilayah ini menciptakan hubungan sosial yang intens antar warga, baik melalui kegiatan adat, ekonomi maupun pemerintahan. Interaksi yang terbangun dari kedekatan tersebut membuat Atapo berkembang sebagai kampung yang terbuka, adaptif, serta memiliki jalinan kekerabatan yang kuat dengan kampung-kampung tetangganya. Letak strategis ini juga mendukung masyarakat kampung Atapo dalam mengakses pelayanan dasar, mobilitas masyarakat dan berbagai kegiatan bersama dalam lingkup distrik.

Adapun batas administratif wilayah Kampung Atapo sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Aparuka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kiyura
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Keakwa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura

b. Luas wilayah dan pembagian zona

Wilayah Kampung Atapo memiliki luas 75.000 meter^2 mencakup ruang hidup yang terdiri atas zona administratif dan zona kelola tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Secara administratif, kampung ini memiliki area permukiman yang berada di kawasan pesisir, dengan kondisi lahan datar yang menunjang pembangunan rumah-rumah warga, fasilitas umum, sekolah, serta sarana kegiatan sosial lainnya. Di sekitar permukiman tersebut, masyarakat menanam pohon kelapa, mangga dan juga mengembangkan kebun kecil dalam demplot yang ditanami beberapa tanaman lokal sebagai pendukung kebutuhan harian. Zona ini menjadi pusat aktivitas penduduk sekaligus ruang yang memperlihatkan perkembangan tata ruang kampung dalam beberapa dekade terakhir.


Percontohn hidroponik (dok.ippm)

Selain wilayah pemukiman, kampung Atapo memiliki zona pertanian rakyat berskala kecil, wilayah rawa, dan area perairan yang menjadi bagian penting dalam struktur ruang kampung. Rawa dan hutan sagu berfungsi sebagai sentra pangan tradisional, tempat masyarakat melakukan aktivitas memangkur sagu, mencari bahan obat-obatan alami dan berburu hewan kecil. Wilayah sungai dan pesisir laut tidak hanya menjadi sumber perikanan tradisional, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama menuju kampung-kampung lain seperti Kiyura, Mimika dan Kokonao. Pola pemanfaatan ruang ini mencerminkan ketergantungan masyarakat pada ekosistem basah yang menjadi fondasi kehidupan sehari-hari serta menciptakan keseimbangan antara pemukiman, sumber pangan dan ruang pergerakkan.

Di luar batas formal kampung, terdapat wilayah kelola tradisional yang dikelola bersama masyarakat Kampung Kiyura, Mimika, Migiwia, Kokonao dan

kampung lain yang memiliki hubungan sejarah. Wilayah kelola ini meliputi pesisir, sungai, hutan dataran rendah, hutan mangrove dan rawa sagu. Setiap zona memiliki karakteristik ekologis dan fungsi pemanfaatan yang berbeda. Sungai menjadi ruang perikanan serta jalur mobilitas; kawasan pesisir menyediakan ikan bernilai ekonomi tinggi seperti kerapu, kakap dan udang; hutan mangrove menghasilkan kepiting bakau, kerang, tambelo, serta kayu bakar; sedangkan rawa dan hutan sagu menjadi pusat sumber pangan tradisional.

c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Topografi Kampung Atapo didominasi oleh bentang alam dataran rendah pesisir yang memanjang dari tepi laut hingga ke kawasan rawa dan hutan sagu di bagian dalam. Wilayah ini memiliki kontur lahan yang relatif landai dengan elevasi rendah, sehingga sebagian besar permukiman dan fasilitas umum berdiri pada area datar yang dekat dengan garis pantai dan alur sungai. Selain kawasan permukiman, terdapat hamparan rawa-rawa air payau dan hutan mangrove yang menjadi ciri utama lanskap pesisir Mimika Barat yang menjadi batas ekologis sekaligus wilayah kelola tradisional masyarakat kampung Atapo. Transisi ini menjadikan kampung Atapo memiliki kombinasi geomorfologi antara pesisir, rawa dan sungai yang kaya keanekaragaman hayati.

Kemiringan lahan di wilayah inti kampung berada pada kategori landai dengan tingkat kemiringan 0-3%, sehingga mudah dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman penduduk kampung. Sementara itu, wilayah rawa dan hutan sagu memiliki permukaan yang lebih jenuh air, dengan tekstur tanah lunak yang khas bagi ekosistem lahan basah. Perbedaan topografis ini membentuk pola pemanfaatan ruang yang berlapis, mulai dari aktivitas kelautan dan perikanan di pesisir, pengolahan sagu dan pemanfaatan obat-obatan alami di rawa, hingga pemanfaatan hasil hutan di dataran tinggi.


Pemukiman penduduk kampung (dok.ippm)

Dilihat dari aspek potensi kerawanan bencana, Kampung Atapo menghadapi beberapa ancaman ekologis yang khas bagi wilayah pesisir dan dataran rendah.

Banjir rob dan genangan musiman kerap terjadi pada periode pasang tinggi, terutama di titik-titik terendah dekat daerah aliran sungai. Kondisi ini diperkuat oleh struktur tanah yang jenuh air serta minimnya elevasi alami. Selain itu, abrasi pesisir menjadi ancaman jangka panjang akibat perubahan arus laut dan faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi stabilitas garis pantai. Pada musim angin kuat, gelombang pasang juga dapat mengganggu aktivitas nelayan serta mempengaruhi keamanan permukiman di area terbuka.

Secara keseluruhan kondisi topografi dan geomorfologi kampung Atapo menunjukkan karakter ekologi pesisir Papua yang dinamis, di mana masyarakat beradaptasi dengan kombinasi dataran rendah, rawa dan sungai dalam satu lanskap yang saling terhubung. Dinamika bentang alam ini tidak hanya menjadi dasar pemanfaatan ruang dan sumber daya, tetapi juga membentuk pola kehidupan serta strategi ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan musim dan potensi bencana alam.

d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Atapo berada pada zona pesisir yang memiliki tipe iklim tropis basah hingga sangat basah, dengan pola musim yang relatif mirip dengan kampung-kampung lain di Mimika Barat. Dalam satu tahun, wilayah ini hanya mengenal dua musim utama, yaitu musim kemarau yang umumnya berlangsung pada Januari hingga Mei, serta musim hujan yang terjadi mulai Juni hingga Desember. Tingginya kelembapan udara dan curah hujan yang merata sepanjang tahun menciptakan lingkungan yang selalu basah dan mendukung tumbuhnya berbagai ekosistem khas pesisir Papua. Berdasarkan pengamatan iklim wilayah pesisir Mimika, rata-rata curah hujan tahunan pada kisaran ±500 mm per bulan, dengan suhu udara antara 22-30°C. Kondisi ini menjadikan kampung Atapo sebagai wilayah yang memiliki produktivitas ekologis tinggi, baik di daratan maupun di kawasan perairan.

Musim ekstrem yang terjadi di Kampung Atapo juga dipengaruhi oleh karakter ekologis pesisir dan keberadaan sungai-sungai besar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pada puncak musim hujan, wilayah ini sering mengalami banjir genangan, terutama di area rawa, permukiman rendah, serta kawasan yang berdekatan dengan aliran Sungai Mimika dan Sungai Kapare. Luapan air biasanya diperparah oleh pasang tinggi dan angin kencang yang umum

terjadi pada periode pertengahan hingga akhir tahun. Sementara itu, pada masa peralihan musim, angin dari arah laut dapat bertiup cukup kuat sehingga mempengaruhi aktivitas melaut dan mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi sungai. Pola perubahan cuaca ekstrem ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat kampung Atapo dan telah membentuk cara mereka beradaptasi terhadap lingkungan, baik melalui penentuan lokasi permukiman maupun pola pemanfaatan sumber daya alam.

Kondisi iklim yang lembap dan sangat basah ini secara langsung mendukung keberadaan sumber daya alam yang menjadi ciri utama Kampung Atapo. Hutan sagu tumbuh subur di wilayah rawa-rawa, menyediakan bahan pangan utama sekaligus penopang budaya masyarakat. Kawasan mangrove yang luas berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, tempat mencari kepiting bakau, kerang dan tambelo, serta menjadi ekosistem penting bagi keberlanjutan perikanan lokal. Sungai-sungai besar yang mengalir di sekitar kampung tidak hanya menjadi jalur transportasi tradisional, tetapi juga menjadi sumber perikanan air tawar yang kaya, seperti ikan, udang dan berbagai biota sungai lainnya. Kombinasi iklim basah, curah hujan tinggi, serta keberadaan ekosistem pesisir yang lengkap menjadikan Kampung Atapo sebagai wilayah dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya.



Citra satelit Kampung Atapo (dok.ippm)

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan kondisi bangunan rumah

Jenis bangunan rumah di Kampung Atapo umumnya bersifat semi permanen**,** menyesuaikan dengan karakter geografis wilayah yang didominasi rawa dan aliran sungai. Konstruksi semi permanen ini biasanya ditopang oleh tiang-tiang kayu dan memiliki pondasi sederhana yang memungkinkan rumah tetap aman saat kondisi tanah berubah. Selain itu masih terdapat rumah non permanen yang mempertahankan bentuk dan teknik bangunan khas masyarakat setempat, terutama

bagi keluarga yang secara turun-temurun tinggal di lingkungan pesisir dengan bentuk rumah panggung sederhana sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Distribusi Kepala Keluarga Kampung Atapo menurut Jenis Rumah Tahun 2025

No.	Jenis Rumah	Jumlah	Persentase
1.	Tidak layak	-	-
2.	Sederhana	8	11,12
3.	Semi permanen	23	31,94
4.	Permanen	-	-
5.	Tidak ada rumah	41	56,94
	Jumlah	72	100

Sumber: Monografi Kampung, 2025

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sebagian besar (56,94%) Kepala Keluarga (KK) di Kampung Atapo belum memiliki rumah sendiri, sehingga masih bergantung pada keluarga bersam orangtua terutama yang belum memiliki kartu keluarga sendiri. Sebagian lainnya menempati rumah semi permanen (31,94%), yang umumnya dibangun dari kombinasi material kayu dan sebagian dinding atau lantai yang lebih kokoh. Sementara itu, terdapat keluarga (11,12%) yang tinggal di rumah sederhana, dengan kondisi bangunan yang memenuhi fungsi dasar hunian namun masih minim fasilitas pendukung. Tidak terdapat KK yang menempati rumah tidak layak maupun rumah permanen. Deskripsi ini menggambarkan bahwa kondisi perumahan masyarakat kampung Atapo masih didominasi struktur hunian yang belum layak dan belum permanen, sehingga menjadi isu penting dalam pembangunan kampung.



Jenis Rumah Semi Permanen (dok.ippm)



Jenis Rumah Sederhana (dok.ippm)

Material bangunan memanfaatkan sumber daya yang mudah diperoleh dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Tiang rumah dan dinding papan umumnya

menggunakan kayu besi (merbau), sementara atap didominasi oleh seng, lantai rumah mayoritas dibuat dari papan, disusun rapi untuk menjaga rumah tetap kering dari kelembaban tanah rawa. Pemilihan bahan bangunan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam sekaligus keterjangkauan ekonomi rumah tangga.

Dari segi kelayakan, kondisi rumah di Kampung Atapo dapat dikategorikan menjadi rumah layak huni, rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat, terutama pada bangunan darurat yang dibangun untuk kebutuhan mendesak. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini telah melaksanakan program bantuan pembangunan rumah melalui Dinas Sosial dan dukungan dana desa, sehingga sebagian keluarga mulai memperoleh hunian yang lebih kokoh dan memenuhi standar hunian sehat.

Kepadatan hunian terlihat mengikuti tata ruang kampung yang berkembang di sepanjang badan jalan utama dan jalan lingkungan. Rumah-rumah cenderung terkonsentrasi di area yang paling mudah diakses. Dalam satu unit rumah, terdapat beberapa rumah yang dihuni 3-4 Kepala Keluarga (KK) karena anak-anak yang telah menikah umumnya tetap tinggal bersama orang tua sambil menunggu ketersediaan rumah baru. Pola hunian berlapis ini mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan permukiman yang siap bangun.

2. Pola Permukiman

Karakter geografis Kampung Atapo yang berada di kawasan rawa-sungai sangat mempengaruhi pola penataan hunian. Kondisi tanah yang labil dan sering tergenang membuat masyarakat memilih membangun permukiman di titik-titik yang dianggap lebih aman dan stabil. Pilihan lokasi hunian yang mengikuti badan jalan juga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk memudahkan mobilitas, terutama saat musim hujan atau banjir. Geografi yang menantang ini mendorong konsentrasi permukiman pada area yang lebih tinggi, sehingga struktur ruang kampung cenderung padat pada beberapa titik tertentu.

Permukiman yang tersebar pada 1 Rukum Wilayah (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT) dengan jarak antar rumah yang sangat berdekatan menimbulkan sejumlah tantangan penataan ruang. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah baru bagi generasi muda semakin terbatas, sehingga banyak keluarga memilih tinggal bersama dalam satu bangunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap ventilasi,

sanitasi dan kualitas lingkungan hunian. Selain itu keterbatasan ruang terbuka dan jalur sirkulasi di dalam permukiman menuntut perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait mitigasi kebakaran, drainase dan penataan fasilitas umum yang memadai.

Dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan hunian, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial dan pemerintah kampung Atapo yang dengan menggunakan dana desa mulai tahun 2023-2025 sehingga mengarahkan pengembangan permukiman ke wilayah yang lebih layak dibangun. Jumlah dan dukungan pembangunan rumah penduduk sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Distribusi Kepala Keluarga Kampung Atapo menurut
Asal bantuan pembangunan Rumah Tahun 2025

No.	Dukungan Pembangunan	Jumlah	Persentase
1.	Mandiri	5	16,13
2.	Bantuan desa	19	61,29
3.	Dinas Sosial	5	16,12
4.	Peninggalan Belanda	2	6,45
	Jumlah	31	100

Sumber: Monografi Kampung, 2025

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sebagian besar (61,29%) rumah masyarakat di kampung Atapo dibangun melalui bantuan dana desa, yang mencerminkan peran signifikan pemerintah kampung dalam memenuhi kebutuhan perumahan warga. Sebagian lainnya membangun rumah secara mandiri (16,13%), menandakan adanya kemampuan terbatas sebagian KK untuk menyediakan hunian dengan sumber daya sendiri. Dukungan dari Dinas Sosial (16,12%) juga berkontribusi pada penyediaan rumah bagi warga tertentu yang membutuhkan. Selain itu, terdapat 6,45% rumah yang merupakan peninggalan Belanda dan masih dihuni hingga kini meskipun umumnya memiliki kondisi fisik yang menua. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Kampung Atapo masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah desa dan lembaga sosial.

Program bantuan rumah yang sedang berjalan menjadi momentum penting untuk memperluas area hunian baru dan mengurangi kepadatan di kawasan inti. Pengembangan ini diharapkan mencakup peningkatan kualitas akses jalan, penyediaan drainase yang memadai, serta penataan ruang yang mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan dan keberlanjutan. Dengan demikian struktur

permukiman Kampung Atapo dapat berkembang lebih tertata, adaptif terhadap kondisi geografis dan mendukung pertumbuhan penduduk di masa mendatang.

3. Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah di Kampung Atapo didominasi oleh rumah milik sendiri yang dibangun sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Rumah-rumah ini menjadi aset utama keluarga dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagian lainnya merupakan rumah yang dihuni secara menumpang, terutama oleh anak-anak yang telah menikah namun belum memiliki rumah sendiri, sehingga tinggal bersama orang tua dalam satu unit hunian.



Rumah Bantuan Dana Desa Atapo (dok.ippm)



Rumah Bantuan Dinas Sosial (dok.ippm)

Sela in rumah milik pribadi yang dibangun secara swadaya, masyarakat Kampung Atapo juga menerima berbagai bantuan perumahan dari pemerintah**,** antara lain melalui program BSPS, RTLH dana desa. Program ini membantu meningkatkan kualitas hunian, memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni, serta memperluas akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap tempat tinggal yang lebih aman dan layak.

Di Kampung Atapo tidak terdapat rumah adat**,** karena perkembangan permukiman lebih diarahkan pada bentuk bangunan fungsional yang disesuaikan dengan kondisi geografis rawa-sungai. Hal ini mencerminkan orientasi masyarakat terhadap kebutuhan hunian modern yang praktis dan adaptif terhadap dinamika lingkungan.

4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar

Rumah-rumah di Kampung Atapo umumnya memiliki ukuran sederhana dengan luas bangunan setara tipe 21. Bangunan utama biasanya terdiri dari satu ruang tamu, dan satu atau dua ruang kamar sesuai kebutuhan keluarga. Ukuran rumah yang relatif kecil ini mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat serta

pola pembangunan bertahap yang umum dilakukan oleh keluarga, namun berdampak terjadap tingkat hunian dalam rumah yang padat karena beberapa keluarga ditempati 3-4 KK dengan jumlah anggota keluarga yang besar antara 8-10 orang setiap rumah.

Luas lahan tempat rumah berdiri sangat bervariasi**.** Rumah yang berada dekat jalan utama umumnya tidak memiliki halaman karena keterbatasan ruang dan kepadatan permukiman. Sebaliknya, rumah yang terletak lebih jauh dari jalan sering memiliki sedikit lahan kosong di sekitarnya, yang dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari seperti menjemur pakaian, menyimpan perahu kecil, atau area bermain anak-anak. Variasi lahan ini menunjukkan adanya ketimpangan ruang yang dipengaruhi lokasi dan perkembangan permukiman.

Dari segi tata ruang, rumah di kampung Atapo umumnya memiliki dua kamar tidur**,** satu ruang tamu dan dapur yang dibangun terpisah dari bangunan utama untuk alasan keamanan serta kebiasaan masyarakat setempat. Kamar mandi dan fasilitas MCK sebagian masih bersifat darurat**,** menggunakan bangunan sederhana yang didirikan di belakang rumah atau dekat sumber air. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan sanitasi layak masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki melalui program pembangunan kampung.


MCK tidak layak/darurat (dok.ippm)

5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga

Akses air bersih di Kampung Atapo masih terbatas dan sangat dipengaruhi kondisi alam. Masyarakat mengandalkan bak penampungan air hujan sebagai sumber utama air bersih, sementara sumur gali digunakan pada musim kemarau, meskipun kualitas airnya berubah sesuai pasang surut. Pada kondisi tertentu, khususnya saat penampungan habis atau sumur kurang layak, warga memanfaatkan air sungai


Sumur Gali dan Penyaringan (dok.ippm)

untuk kebutuhan dasar. Ketergantungan pada sumber air alamiah ini membuat ketersediaan air bersih sangat fluktuatif.

Sistem sanitasi rumah tangga umumnya menggunakan jamban keluarga yang terpisah dari rumah dengan septictank sederhana. Sebagian keluarga belum memiliki jamban sendiri dan menggunakan jamban milik bersama tetangga karena keterbatasan sarana dan tidak tersedianya fasilitas yang lebih permanen. Tahun 2025 pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas PU, sedang membanggun 6 unit MCK yang representatif. Sebelumnya kampung Atapo melalui TNI mendapat sumbangan 2 unit MCK. Sementara itu, sistem pengelolaan sampah belum terorganisasi; masyarakat biasanya membakar sampah atau membuangnya secara bebas karena tidak ada layanan pengangkutan maupun tempat pembuangan yang khusus disediakan.



MCK Permanen Bantuan Pemkab (dok.ippm)

Kondisi lingkungan permukiman juga dipengaruhi minimnya sarana drainase dan keterbatasan fasilitas penerangan. Drainase rumah tidak tersedia**,** sehingga kawasan permukiman mudah tergenang saat hujan atau air pasang. Dari sisi penerangan, sebagian besar rumah menggunakan listrik PLN sistem token**,** namun pemadaman masih sering terjadi bila ketersediaan BBM berkurang. Saat listrik padam, warga mengandalkan lampu minyak sebagai sumber cahaya alternatif. Situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas hidup masyarakat kampung secara lebih berkelanjutan.

6. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kebersihan lingkungan di sekitar rumah-rumah warga Kampung Atapo masih perlu banyak perhatian. Banyak pekarangan yang tidak terawat, ditandai dengan rumput yang tumbuh tinggi dan tidak dipangkas secara rutin. Sampah rumah tangga sebagian besar dibuang sembarangan**,** baik di sekitar halaman maupun di tepi sungai. Saat air pasang**,** sampah tersebut ikut terbawa arus sehingga tidak hanya mencemari lingkungan kampung, tetapi juga memperburuk kualitas ekosistem sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sistem pengelolaan sampah masih menjadi tantangan penting di tingkat rumah tangga.

Akses menuju rumah warga terdiri atas jalan tanah dan jalan semen, termasuk ruas utama kampung yang menghubungkan antar RT. Pada musim hujan, jalan tanah sering menjadi becek dan sulit dilalui, sementara jalan semen yang telah dibangun dengan dana desa sepanjang 208 meter dan lebar 2 meter, hanya mencakup sebagian kecil area permukiman penduduk. Terbatasnya infrastruktur jalan ini mempengaruhi mobilitas warga, khususnya untuk aktivitas harian seperti bekerja, bersekolah, atau membawa hasil tangkapan dan hasil kebun. Ketersediaan akses yang belum merata juga menghambat peningkatan kualitas hidup dan pelayanan di tingkat kampung.


Lokasi Pemukiman yang Landai (dok.ippm)

Dari segi kerentanan, Kampung Atapo menghadapi risiko banjir yang cukup tinggi, terutama ketika air pasang laut besar yang selalu mencapai kawasan permukiman dan menggenangi rumah penduduk. Daerah di tepi sungai juga mengalami abrasi, sehingga mengancam rumah-rumah yang berada dekat bantaran. Sementara itu, halaman atau pekarangan rumah sangat terbatas, bahkan banyak rumah tidak memiliki pagar maupun penanda batas lahan yang jelas. Kondisi ini mencerminkan pola permukiman yang tumbuh secara alami tanpa perencanaan spasial yang baku, sehingga batas antar rumah cenderung terbuka dan menyatu. Penataan ruang dan mitigasi risiko menjadi aspek penting untuk mendukung keberlanjutan permukiman Kampung Atapo di masa mendatang.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli kampung Atapo

Penduduk asli Kampung Atapo berasal dari beberapa marga lokal seperti Akimuri, Matamoa, Potarepea, Ewakipiuta yang memiliki hubungan kekerabatan kuat dan merupakan bagian dari komunitas pesisir Mimika, terutama marga-marga yang secara historis bermukim di daerah pantai sebelum relokasi ke wilayah kampung yang sekarang. Sistem kekerabatan yang digunakan umumnya patrilineal, sehingga hak atas tanah, pewarisan nama dan posisi adat diturunkan melalui garis laki-laki. Pola permukiman di kampung

masih memperlihatkan sebaran berdasarkan marga, di mana setiap kelompok keluarga menempati zona yang saling berdekatan untuk mempertahankan kedekatan genealogis, memudahkan koordinasi adat dan menjaga kelestarian hubungan antar marga dalam kehidupan sehari-hari.

b. Suku pendatang di Kampung Atapo

Kampung Atapo turut dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah, seperti suku Papua dari luar Mimika (suku Biak dan Mandobo), suku Kei, Bugis dan Makasar yang telah bermukim dalam rentang waktu berbeda namun ada yang baru beberapa tahun, tetapi sebagian besar telah tinggal cukup lama terutama suku Kei sebagai guru sehingga terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sosial kampung. Para pendatang menyesuaikan diri dengan adat setempat, mengikuti tata tertib kampung, serta aktif dalam kegiatan sosial seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan dan gotong royong. Integrasi ini menciptakan hubungan yang stabil, dimana pendatang diterima sebagai bagian dari komunitas dan turut berkontribusi dalam dinamika ekonomi maupun penguatan kehidupan komunal.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Kelompok etnis asli Kampung Atapo memiliki peran sentral dalam pemerintahan kampung, pengelolaan adat dan pemanfaatan lahan, sedangkan masyarakat pendatang berkontribusi pada pengembangan ekonomi, jasa, perdagangan kecil, serta kegiatan keagamaan sesuai latar belakang dan kemampuan mereka. Keduanya saling melengkapi dalam penyelenggaraan kegiatan kampung; suku asli menguatkan fondasi adat dan kepemimpinan lokal, sementara pendatang menambah dinamika produktif melalui keterampilan dan jejaring sosial yang mereka bawa. Peran ini membentuk kerja sama yang konstruktif dalam pembangunan kampung, penyelesaian persoalan sehari-hari, dan pemeliharaan kerukunan antar warga.

d. Relasi sosial antar suku di Kampung Atapo

Interaksi sosial di Kampung Atapo berlangsung dalam suasana yang relatif harmonis, ditandai dengan gotong royong pada kegiatan pembangunan jalan, pembersihan lingkungan, serta dukungan bersama dalam acara keagamaan dan adat. Warga dari suku asli maupun pendatang menjaga relasi dengan saling menghormati norma lokal, membangun komunikasi terbuka, serta

menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah kampung. Pola ini memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa kebersamaan dan menciptakan kehidupan sosial yang stabil, sehingga keberagaman etnis menjadi kekuatan yang mendukung berkembangnya kampung secara kolektif.

2. Nilai dan Kearifan Lokal

a. Norma adat dan sistem sosial

Norma adat di Kampung Atapo menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial, penyelesaian masalah, serta pemanfaatan lahan ulayat yang diwariskan dari leluhur. Aturan adat menekankan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam meredakan konflik, baik antar individu maupun antar marga, dengan mengutamakan kesepakatan bersama dan pemulihan hubungan. Pembagian lahan ulayat dilakukan berdasarkan garis keturunan marga dan setiap keluarga mengetahui batas serta tanggung jawabnya dalam menjaga wilayah tersebut. Struktur adat dipimpin oleh kepala marga, tua adat dan dewan adat yang berperan menetapkan keputusan penting, menjaga kesinambungan budaya, serta memastikan bahwa nilai-nilai leluhur tetap menjadi dasar dalam kehidupan kampung.

b. Ritual, tradisi dan upacara

Kampung Atapo masih mempertahankan sejumlah ritual dan tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan dan keagamaan, seperti upacara pernikahan adat, penyambutan kelahiran, ritual duka cita, serta tradisi syukuran ketika hasil kebun atau tangkapan ikan melimpah. Kegiatan-kegiatan ini sering diiringi musik dan tarian tradisional (tari seka) sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan identitas masyarakat. Kehadiran ritual tersebut tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran generasi muda mengenai nilai budaya dan sejarah kampung.

c. Pengetahuan lokal

Masyarakat kampung Atapo memiliki pengetahuan lokal yang kuat dalam mengelola hutan, sungai, sagu, hasil kebun, serta sumber daya perikanan, dengan memahami pola musiman, pasang surut air dan lokasi-lokasi yang aman untuk beraktivitas. Mereka juga memiliki kearifan dalam menghadapi risiko bencana lokal, terutama air pasang besar yang sering terjadi, melalui pengaturan waktu

melaut (ketinggian air pasang dan surut), pemilihan lokasi tempat tinggal dan cara-cara tradisional memitigasi bahaya. Pengetahuan mengenai obat-obatan alami, navigasi sungai, membaca arah arus dan kedangkalan air, serta keterampilan membuat kerajinan tangan diwariskan turun-temurun dan menjadi modal penting dalam keberlangsungan hidup komunitas.

d. Nilai-nilai dasar masyarakat

Nilai solidaritas dan gotong royong sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat kampung Atapo, terlihat dari kesediaan warga membantu satu sama lain dalam pekerjaan berat, pembangunan fasilitas kampung, maupun kegiatan adat dan keagamaan. Hubungan antar marga dibangun atas dasar kerjasama dan penghargaan terhadap peran masing-masing dalam struktur sosial, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling mendukung. Nilai kekeluargaan dijunjung tinggi dan tokoh adat serta tokoh agama mendapatkan tempat terhormat dalam proses pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan pembinaan moral masyarakat.

e. Bahasa lokal

Bahasa Mimika sebagai bahasa lokal masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama oleh masyarakat asli dan para tetua kampung, namun penggunaannya cenderung menurun di kalangan generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Upaya pelestarian bahasa terus dilakukan melalui penyampaian cerita rakyat, penggunaan bahasa dalam upacara adat serta pengajaran informal di lingkungan keluarga. Meskipun tantangan modernisasi cukup besar, bahasa lokal tetap menjadi elemen penting yang memperkuat identitas budaya Kampung Atapo dan menjadi simbol keterikatan masyarakat kepada sejarah leluhur mereka.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kampung Atapo menunjukkan komposisi demografis yang relatif kecil namun dinamis. Berdasarkan data agregat semester-1 tahun 2025 (Dukcapil), total penduduk yang mendiami Kampung Atapo mencapai 322 jiwa yang tersebar dalam 80 Kepala Keluarga (KK). Struktur ini mencerminkan karakter permukiman kampung pesisir yang berkembang secara bertahap

melalui mobilitas internal masyarakat Kamoro maupun kedatangan penduduk dari wilayah sekitar.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki mencapai 173 jiwa (53,73%), sedangkan jumlah perempuan sebanyak 149 jiwa (46,27%). Perbandingan ini memperlihatkan dominasi populasi laki-laki yang cukup signifikan, yang pada konteks kehidupan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan peran laki-laki dalam aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Secara etnis, masyarakat Kampung Atapo didominasi oleh Suku Kamoro sebagai penduduk asli yang telah menempati kawasan ini secara turun-temurun. Identitas Kamoro tercermin dalam pola permukiman, praktik adat, bahasa sehari-hari, serta orientasi mata pencaharian yang kuat pada sumber daya pesisir dan sungai. Keberadaan mereka menjadi fondasi sosial-budaya utama dalam kehidupan kampung.

Selain penduduk asli, terdapat pula kelompok pendatang dalam jumlah kecil yang telah menetap sejak tahun 1960-an (suku Kei) dan 1980-an (suku Bugis-Makasar) dan suku Papua dari luar Kabupaten Mimika. Kelompok ini umumnya bekerja sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan petigas lainnya, serta pedagang yang berperan dalam memperkuat aktivitas ekonomi kampung, memperkaya interaksi sosial, serta mendukung ketersediaan layanan dasar di kampung. Kehadiran penduduk pendatang ini semakin memperluas jejaring sosial sekaligus memperkuat struktur kehidupan masyarakat Kampung Atapo secara keseluruhan.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi.

Distribusi penduduk Kampung Atapo menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Umur Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	18	5,59
2.	5 - 9	41	12,73
3.	10 - 14	54	16,77
4.	15 - 19	39	12,11
5.	20 - 24	29	9,01
6.	25 - 29	27	8,39
7.	30 - 34	25	7,76
8.	35 - 39	29	9,01
9.	40 - 44	17	5,28
10.	45 - 49	11	3,42
11.	40 - 54	12	3,73
12.	55 - 59	9	2,80
13.	60 - 64	3	0,93
14.	65+	8	2,48
	Total	322	100

Sumber: Dukcapil, DKB Semester-I Tahun 2025

Distribusi penduduk kampung Atapo berdasarkan Rasio beban tanggungan *(Dependency Ratio)* yaitu sebesar:

$$\frac{121 + 8}{201} \times 100 = 60{,}19 \text{ dibulatkan menjadi } 60$$

Sesuai dengan angka tersebut di atas, berarti DR di kampung Atapo sebesar 60, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 60 orang yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan ≥ 64 tahun). Tingginya angka rasio beban tanggungan ini merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Atapo, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau tidak produktif.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Tahun 2025 jumlah penduduk kampung Atapo yang baru terekam administrasi kependudukan e-KTP 82,63%, KTA 81,48%, KK 100% dan Akta Kelahiran 100%. Fakta ini menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk kampung Atapo telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpeluang mengakses berbagai layanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

Rendahnya cakupan perekaman terutama pada kelompok laki-laki mengindikasikan adanya kendala mobilitas, tingkat kesadaran, atau keterbatasan akses terhadap layanan perekaman di kampung. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih proaktif, kolaboratif dan sensitif konteks lokal agar seluruh penduduk dapat tercatat secara sah sebagai bagian dari sistem kependudukan negara.

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil diselesaikan oleh seseorang, serta mencerminkan kemampuan literasi, kapasitas kerja dan potensi partisipasi dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Akses pendidikan di Kampung Atapo masih sangat terbatas, hanya tersedia SD Negeri sebagai satu-satunya lembaga pendidikan formal yang dapat dijangkau langsung oleh anak-anak. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, peserta didik harus melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA yang berada di ibu kota distrik atau bahkan harus pergi ke Kota Timika. Kondisi tersebut membuat proses melanjutkan sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga karena keterbatasan akses, biaya dan dukungan logistik bagi anak-anak yang harus tinggal jauh dari rumah. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya keberlanjutan pendidikan dan tingginya angka putus sekolah, terutama pada transisi dari SD ke SMP.

Fakta data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Atapo saat ini belum menikmati akses pendidikan yang memadai. Data mencatat 46,27% penduduk tidak bersekolah, belum tamat SD 11,18%, tamat SD 9,63%, SMP 21,74% dan SMA 9,63% lebih rendah dari PT 1,55%. Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk (88,82%) masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan tidak berpendidikan, sehingga kapasitas literasi dan keterampilan dasar masyarakat masih sangat terbatas.

Distribusi penduduk Kampung Atapo menurut tingkat pendidikan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	76	73	149	46,27
2.	Belum Tamat SD	18	18	36	11,18
3.	Tamat SD	12	19	31	9,63
4.	SLTP	43	27	70	21,74
5.	SLTA	21	10	31	9,63
6.	Akademi/D-III	1	1	2	0,62
7.	D-IV/S-1	2	1	3	0,93
	Jumlah	173	149	322	100

Sumber: Dukcapil, DKB Semester-I Tahun 2025

Berdasarkan kondisi fakta ini, terlihat jelas bahwa Kampung Atapo belum memenuhi target Wajib Belajar 9 Tahun, yang minimal mensyaratkan penyelesaian pendidikan hingga jenjang SMP. Rendahnya persentase lulusan SMP dan tingginya jumlah penduduk yang tidak sekolah ataupun hanya tamat SD menunjukkan adanya hambatan serius dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, baik dari sisi sarana, dukungan keluarga, maupun kondisi sosial ekonomi. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan memerlukan intervensi pendidikan yang lebih responsive, terarah, terukur dan berkelanjutan dengan pendekatan kontekstual berbasis kearifan lokal untuk memutus rantai ketertinggalan.

Akses pendidikan nonformal seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, pelatihan vokasional, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, hanya tersedia di Kota Timika dan hampir tidak pernah diikuti oleh warga Kampung Atapo. Tidak adanya program pendidikan nonformal yang diselenggarakan di kampung menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dasar, memperluas wawasan, atau mengembangkan kemampuan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Akibatnya peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terbatas, dan sebagian besar penduduk tetap bergantung pada pengetahuan tradisional serta kemampuan lokal.

d. Mata pencaharian/pekerjaan

Matapencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauhmana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Atapo menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Matapencaharian Tahun 2025

No.	Matapencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum Bekerja	273	84,78
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3	0,93
3.	Tenaga Pengajar	5	1,55
4.	Wiraswasta	10	3,11
5.	Petani/Pekebun	19	5,90
6.	Nelayan	12	3,73
	Jumlah	322	100

Sumber: Dukcapil, DKB Semester-I Tahun 2025

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa struktur ekonomi kampung Atapo yang masih didominasi aktivitas subsisten dan keterbatasan kesempatan kerja formal. Sebagian besar penduduk tidak bekerja (84,74%), sedangkan sebagai pertain dan berkebun (5,90%) dan nelayan (3,73%), yang umumnya bekerja mengikuti musim serta kondisi lingkungan pesisir dan daratan. Pekerjaan formal masih sangat terbatas, dengan wiraswasta (3,11%) dan lainnya sebagai ASN dan tenaga pengajar kurang dari 2 persen.

Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Atapo masih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi tradisional. Dominasi nelayan dan petani tradisional serta rendahnya proporsi pekerjaan formal menunjukkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang lebih mapan. Struktur matapencaharian tersebut menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat kampung Atapo pada sektor informal serta perlunya pengembangan keterampilan dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kampung.

e. Status sosial ekonomi

Sebagian besar penduduk Kampung Atapo masih berada pada kategori miskin, dengan ciri keterbatasan pendapatan, minimnya aset produktif dan ketergantungan pada matapencaharian subsisten. Kelompok menengah terdiri dari rumah tangga yang memiliki pekerjaan lebih stabil seperti pedagang kios dan ASN. Sementara itu, penduduk yang masuk kategori sejahtera jumlahnya sangat terbatas dan umumnya memiliki sumber pendapatan tetap atau usaha kecil yang berkembang.

Akses terhadap layanan dasar masih belum optimal, walaupun terdapat sumur gali tetapi airnya hanya digunakan untuk mencuci. Pemenuhan air bersih bergantung pada sumber alami dan penampungan air hujan, sehingga tidak selalu stabil. Listrik melalui PLN telah tersedia, tetapi pemanfaatannya terbatas oleh daya dan kemampuan biaya rumah tangga. Layanan kesehatan hanya dapat diakses melalui fasilitas Puskesmas di tingkat distrik (puskesmas lama di kampung Apuri dan puskesmas baru di kampung Kokonau) atau langsung mengakses layanan berdasarkan rujukan puskesmas ke RSUD Daerah dan RSUD Caritas di Kota Timika, sehingga jarak dan transportasi menjadi kendala utama bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat.



LPJU dari Listrik PLN (dok.ippm)

f. Agama dan lembaga keagamaan

Keberagaman agama di Kampung Atapo mencerminkan dinamika sosial yang berkembang sejak masa awal penyebaran iman di wilayah kabupaten Mimika. Pemahaman masyarakat tentang agama berakar pada sejarah panjang kehadiran para misionaris berkebangsaan Belanda yang mulai memperkenalkan ajaran Katolik di Kokonao sejak tahun 1920-an. Proses pewarisan nilai-nilai iman tersebut berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam pembentukan jati diri serta karakter masyarakat setempat.

Mayoritas penduduk Kampung Atapo (91,30%) menganut agama Katolik, yang merupakan agama dominan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan

sosial, budaya, serta praktik keagamaan komunitas yang tersebar pada dua Komunitas Basis (Kombas) dalam Paroki Maria Bintang Laut Kokonau. Gereja berfungsi sebagai pusat kegiatan rohani dan wadah pemersatu yang memperkuat solidaritas di antara warga. Nilai-nilai yang diajarkan dalam tradisi Katolik berperan dalam membentuk etika sosial, pola relasi antarwarga, dan cara masyarakat menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Distribusi penduduk Kampung Atapo menurut agama pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Agama
Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Katolik	294	91,30
2.	Protestan	11	3,42
3.	Islam	17	5,28
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	322	100

Sumber: Dukcapil, DKB Semester-I Tahun 2025

Selain pemeluk Katolik, terdapat pula sejumlah penduduk dari kalangan pendatang yang memeluk agama Islam dan Protestan. Kelompok pendatang ini umumnya berprofesi sebagai pedagang, guru atau tenaga kesehatan yang datang untuk bekerja dan menetap sementara maupun dalam jangka panjang. Kehadiran mereka menciptakan keberagaman yang harmonis, di mana setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa mengurangi rasa saling menghormati antar warga.

4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

a. Mobilitas masuk antar kampung

Pergerakan penduduk antar kampung di distrik Mimika Barat menuju kampung Atapo berlangsung lancar karena tersedianya dermaga umum yang menjadi titik akses utama transportasi air. Dermaga ini memudahkan penduduk dari kampung sekitar maupun dari Kota Timika untuk datang ke kampung Atapo. Mayoritas pendatang berasal dari Timika dengan tujuan utama untuk melakukan kunjungan keluarga, menghadiri acara keagamaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan adat. Kehadiran penduduk non-OAP biasanya

terkait pelaksanaan tugas tertentu, seperti pelayanan pemerintahan, kegiatan teknis, atau tugas kelembagaan. Meskipun mobilitas masuk cukup rutin terjadi, tidak terdapat pengaruh berarti terhadap struktur sosial, pola hubungan komunitas, maupun aktivitas ekonomi masyarakat Atapo. Tatanan adat, solidaritas antar marga, serta pola ekonomi lokal tetap berjalan stabil.

b. Migrasi keluar

Penduduk kampung Atapo melakukan migrasi keluar menuju kota, terutama Timika dengan tujuan bervariasi. Beberapa di antaranya menetap lebih lama di kota karena alasan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, sementara lainnya kembali ke kampung setelah urusan selesai setelah mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan pemerintahan dan pelayanan keagamaan.

Mobilitas penduduk keluar ini memberikan dampak positif melalui pengiriman uang atau remitan dari anggota keluarga yang berada di kota, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial di kampung. Interaksi dengan lingkungan perkotaan turut membawa perubahan dalam cara pandang, gaya hidup dan pola komunikasi terutama generasi muda, meskipun tidak sampai menggeser nilai-nilai adat dan budaya lokal.

c. Mobilitas harian dan berkala

Aktivitas keluar-masuk penduduk kampung Atapo juga berlangsung secara harian maupun musiman. Pergerakan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti mengambil hasil kebun, pergi ke dusun sagu, menangkap ikan di sungai, atau melakukan aktivitas lainnya ke Timika.

Mobilitas berkala terjadi pada musim tertentu, terutama ketika masyarakat melakukan memperoleh hasil laut (udang dan kepiting) yang melimpah, pengolahan sagu, atau mengikuti agenda adat dan keagamaan di kampung tetangga yang letaknya bersambung. Pola pergerakan ini merupakan bagian dari rutinitas masyarakat dan tidak berdampak pada perubahan permanen dalam komposisi penduduk.

d. Dinamika komposisi penduduk

Meskipun terdapat mobilitas masuk, migrasi keluar dan pergerakan harian, komposisi penduduk Kampung Atapo pada dasarnya tetap stabil. Dinamika mobilitas tersebut tidak menimbulkan perubahan berarti terhadap struktur

demografi maupun proses perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Jumlah penduduk cenderung konstan dan kebutuhan pelayanan publik masih dapat dipenuhi oleh kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, mobilitas yang terjadi menjadi bagian dari dinamika sosial normal tanpa mempengaruhi pola pembangunan dan tata kehidupan kampung.

D. Pendidikan

1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan

a. Pandangan umum masyarakat

Masyarakat Kampung Atapo pada dasarnya memiliki pandangan positif terhadap pendidikan sebagai bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak mereka. Walaupun tidak semua keluarga memiliki pengalaman pendidikan yang memadai, sebagian besar orangtua meyakini bahwa sekolah adalah sarana untuk memperluas wawasan dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Namun, persepsi tersebut seringkali berhadapan dengan realitas kehidupan sehari-hari, terutama keterbatasan akses dan tuntutan ekonomi rumah tangga.

Secara umum, pendidikan dianggap penting oleh masyarakat, terutama dalam konteks mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Orang tua memahami bahwa kemampuan membaca, menulis dan berhitung adalah bekal dasar yang wajib dimiliki anak. Meski demikian kondisi sosial-ekonomi membuat sebagian keluarga menempatkan pendidikan sebagai prioritas kedua setelah kebutuhan untuk memenuhi makan sehari-hari. Dalam situasi tertentu, anak tetap dilibatkan untuk membantu orang tua mencari nafkah, seperti mencari ikan, mengumpulkan hasil alam, atau membantu kegiatan rumah tangga, sehingga waktu belajar sering terbagi bahkan sering anak tidak tidak masuk sekolah.

Orang tua di Kampung Atapo memiliki harapan yang cukup besar terhadap anak-anak mereka yang bersekolah, walaupun dalam keluarga terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Mereka menginginkan anak dapat menuntaskan pendidikan setidaknya sampai tingkat SMA, meskipun fasilitas pendidikan di kampung hanya tersedia hingga jenjang SD. Untuk melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA, anak harus berjalan kaki cukup jauh menuju pusat distrik di Kokonau, suatu tantangan yang memerlukan ketekunan dan dukungan keluarga. Meskipun

berat, masyarakat tetap berharap pendidikan dapat membuka jalan bagi anak-anak untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak di masa depan, baik sebagai pegawai pemerintahan, tenaga kesehatan, guru, maupun profesi lain yang mereka anggap terhormat.

Masyarakat Atapo memahami pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial keluarga. Pendidikan dipandang bukan hanya sebagai proses belajar di kelas, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan pergaulan, mengenal dunia luar, serta mengubah pola pikir generasi muda agar lebih siap menghadapi perubahan. Bagi banyak keluarga, pendidikan juga dianggap sebagai modal penting untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun pemahaman tentang fungsi pendidikan masih beragam, aspirasi umum masyarakat mengarah pada keyakinan bahwa sekolah adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak dan keluarga.

b. Peran keluarga dalam pendidikan anak

Keterlibatan orang tua di Kampung Atapo dalam mendukung pendidikan anak masih terbatas dan cenderung bersifat formal. Pada umumnya orang tua memastikan kehadiran anak di sekolah hanya pada momen-momen penting, seperti pembagian rapor atau pertemuan resmi antara sekolah dan wali murid. Di luar waktu tersebut, tanggungjawab pendidikan anak lebih banyak diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola pikir bahwa guru memiliki otoritas utama dalam proses belajar-mengajar, serta keterbatasan waktu orang tua yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah juga menghadapi tantangan. Keterbatasan fasilitas belajar, seperti buku, pencahayaan yang memadai dan ruang belajar yang nyaman, membuat proses belajar di rumah tidak optimal. Selain itu, sebagian besar orang tua bekerja sejak pagi hingga sore, bahkan hingga malam hari, sehingga ketika kembali ke rumah mereka sudah kelelahan dan sulit memberikan pendampingan belajar secara konsisten. Situasi ini menyebabkan kegiatan belajar anak di rumah lebih banyak bergantung pada inisiatif individu anak serta dukungan terbatas dari anggota keluarga lainnya.

Meskipun keterlibatan akademik masih terbatas, masyarakat Kampung Atapo memiliki praktik pendidikan berbasis budaya lokal yang kuat. Anak-anak sejak kecil diajak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi keluarga, seperti menangkap ikan dan udang, mengambil tepung sagu, atau membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Melalui aktivitas ini mereka memperoleh keterampilan hidup yang penting, memahami nilai gotong royong, serta mewarisi pengetahuan lokal yang telah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat.

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga juga membentuk kemandirian dan kemampuan mengelola tanggung jawab anak sejak usia dini. Dalam konteks sosial budaya setempat, pembiasaan ini sering dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan anak. Secara tidak langsung, pola asuh dan pembentukan karakter tersebut berhubungan dengan fenomena kawin usia muda yang masih ditemui di kampung Atapo. Karena anak dianggap sudah cukup terampil, bertanggung jawab dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga, sebagian masyarakat menilai bahwa mereka telah siap membangun rumah tangga meskipun usianya masih relatif muda.

Dengan demikian, praktik pendidikan budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai pewarisan keterampilan hidup, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kesiapan anak menuju kehidupan dewasa, termasuk kesiapan memasuki pernikahan pada usia yang lebih dini dibandingkan standar nasional usia minimal 19 tahun.

c. Nilai-nilai lokal tentang pendidikan

Masyarakat Kampung Atapo memiliki nilai-nilai lokal yang mempengaruhi cara mereka memandang pendidikan. Kearifan adat menekankan kemandirian, gotong royong, serta keterampilan hidup berbasis alam. Nilai ini mendukung pembentukan karakter anak, namun pada saat yang sama dapat menghambat pendidikan formal karena anak sering terlibat dalam pekerjaan keluarga dan kegiatan adat. Sebagian nilai adat mendorong anak untuk menuntut ilmu demi membawa nama baik keluarga dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, kewajiban membantu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga membuat waktu belajar anak terbatas, sehingga kontinuitas pendidikan formal sering terganggu.

Khusus generasi muda kampung Atapo menunjukkan pandangan yang positif terhadap sekolah dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Namun, keinginan tersebut sering terhambat kondisi ekonomi keluarga. Anak akhirnya lebih banyak membantu orang tua, meskipun sebenarnya memiliki motivasi kuat untuk belajar. Dengan keterbatasan biaya dan akses, masyarakat berharap pendidikan yang lebih praktis dan langsung bermanfaat, seperti keterampilan perikanan, pertanian atau kerajinan. Pendidikan berbasis keterampilan dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan hidup dan peluang ekonomi di kampung.

2. Kelembagaan Pendidikan

a. Jenis lembaga dan status sekolah

Ketersediaan layanan pendidikan di Kampung Atapo masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tingkat pendidikan anak usia dini, tidak terdapat fasilitas PAUD/TK sehingga anak-anak harus ke kampung Apuri yang terdapat PAUD/TK YPPK Bintang Laut. Kondisi ini membuat sebagian anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan tersebut dan tidak memperoleh stimulasi pendidikan awal yang memadai sebelum masuk sekolah dasar.

Untuk pendidikan dasar, Kampung Atapo hanya memiliki satu unit SD Negeri sebagai lembaga pendidikan formal utama, namun jenjang berikutnya, SMP, SMA belum tersedia di dalam kampung. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan harus berjalan kaki menuju SMP YPPK di kampung Apuri dan SMAN-3 yang terletak di pusat distrik kampung Kokonau dan berjarak cukup jauh, sehingga menjadi hambatan yang menyebabkan banyak anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Selain pendidikan formal, masyarakat Kampung Atapo juga mengandalkan sekolah minggu di Gereja Katolik sebagai wadah pembinaan moral dan spiritual bagi anak-anak usia dini dan bagi orang muda Katolik (OMK). Kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai iman, disiplin, dan rasa kebersamaan di antara anak dan remaja di kampung.

Dalam tahun 2025 ini, pemerintah mulai memperkenalkan kegiatan sekolah sepanjang hari (SSH) sebagai program pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dilengkapi dengan penyediaan makanan bagi siswa. Program ini bertujuan meningkatkan kehadiran anak di sekolah, memperbaiki gizi dan memperkuat proses

pembelajaran. Meskipun disambut positif, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran bahwa terlalu lamanya anak berada di sekolah dapat membuat mereka kurang terlibat dalam kehidupan keluarga dan adat, termasuk kekhawatiran anak "lupa rumah" atau terputus dari identitas budaya kampung. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan manfaat pendidikan formal dengan pelestarian nilai-nilai lokal.

b. Aksesibilitas dan fasilitas sekolah

Di Kampung Atapo terdapat satu unit SD Negeri yang berlokasi di wilayah kampung sehingga memudahkan akses anak-anak untuk bersekolah. Sekolah ini menjadi pusat layanan pendidikan dasar bagi seluruh siswa di kampung dan telah memiliki fasilitas dasar seperti 1 ruang kantor, 1 ruang kelas yang digunakan sebagai ruang guru, 6 ruang kelas, serta 10 kopel rumah guru. Namun demikian, sekolah masih menghadapi kekurangan dan keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, khususnya perpustakaan, laboratorium, toilet dan akses air bersih serta jembatan masuk ke sekolah



Gedung SD Negeri Atapo (dok.ippm)



Perumahan Guru SDN Atapo (dok.ippm)

c. Manajemen dan tata kelola

Manajemen pendidikan di SD Negeri kampung Atapo sebagai satu-satunya layanan pendidikan dasar, masih menghadapi keterbatasan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kapasitas pengelola sekolah, minimnya tenaga guru, serta kurangnya pelatihan dan supervisi dari pemerintah distrik membuat tata kelola sekolah belum efektif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Komite sekolah sebagai representati masyarakat di sekolah telah dibentuk, tetapi keberadaannya masih sebatas memenuhi persyaratan administratif. Struktur organisasi tidak lengkap, tidak memiliki rencana kerja, dan kurang berperan sesuai

fungsinya dalam pengawasan maupun dukungan terhadap program sekolah. Akibatnya, komite belum mampu menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

Peran tokoh adat dan tokoh agama yang sesungguhnya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat juga belum optimal dimanfaatkan dalam penguatan tata kelola sekolah. Keterlibatan mereka masih terbatas pada dukungan moral dan kegiatan keagamaan, padahal kontribusi mereka penting untuk mendorong kedisiplinan siswa serta meningkatkan perhatian orang tua terhadap pendidikan.

Hubungan sekolah, orang tua dan masyarakat secara umum masih lemah dan belum terbangun dalam pola kolaboratif yang berkelanjutan. Komunikasi lebih sering terjadi pada saat-saat tertentu seperti pembagian rapor, sementara keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah rendah karena kesibukan sehari-hari dan keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya peran aktif dalam pendidikan. Kondisi ini membuat sekolah bekerja dengan sumber daya yang terbatas tanpa dukungan penuh dari lingkungan sekitar.

3. Keadaan Guru dan Murid

SD Negeri Kampung Atapo dengan jumlah siswa 126 dilayanai enaga pendidik pada terdiri atas guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 orang, guru P3K 2 orang dan guru honorer 2 orang yang bersama-sama menjalankan tugas pembelajaran di sekolah yang ada di kampung. Komposisi ketiga kelompok guru tersebut memungkinkan proses pendidikan tetap berjalan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengajaran pada setiap jenjang kelas.

Keadaan jumlah siswa dan guru SDN Kampung Atapo sebagai berikut:

Tabel 3.7 Keadaan Siswa dan Guru SD Negeri Kampung Atapo
Tahun 2025

No.	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1.	Kelas 1	20	1
2.	Kelas 2	21	1
3.	Kelas 3	29	1
4.	Kelas 4	21	1
5.	Kelas 5	20	1
6.	Kelas 6	15	1
	Jumlah	126	6

Sumber: Monografi SDN Atapo, 2025

Secara umum guru-guru SDN Atapo telah memiliki kualifikasi akademik Strata Satu (S1) sesuai ketentuan standar pendidikan nasional dan 4 orang guru sudah memiliki sertifikat pendidik, sehingga peningkatan kompetensi profesional masih menjadi kebutuhan penting. Upaya pengembangan kapasitas, baik melalui pelatihan maupun pendampingan, diperlukan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan manajemen kelas.

Kehadiran guru pada tahun ajaran berjalan tergolong stabil karena sebagian besar telah tinggal di rumah dinas yang berada satu kompleks dengan sekolah. Kondisi ini membantu memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar setiap hari. Namun demikian, masih terdapat praktik pelaksanaan ujian akhir semester yang dilakukan lebih awal dari jadwal resmi**,** diikuti dengan keberangkatan guru ke kota. Pola ini berdampak pada berkurangnya waktu efektif belajar peserta didik dan menjadi catatan penting bagi peningkatan disiplin dan tata kelola akademik ke depan.

4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar

Tingkat kehadiran siswa di sekolah umumnya stabil setiap hari, kecuali pada saat perayaan hari raya keagamaan dan libur nasional. Namun, masih terdapat kebiasaan sebagian anak mengikuti orang tua mencari bahan makanan di sungai, hutan, atau kebun, sehingga menyebabkan mereka tidak hadir di sekolah. Dalam proses pembelajaran, anak-anak menunjukkan antusiasme dan perilaku aktif secara fisik, tetapi pada aspek akademik mereka cenderung pasif, terutama dalam kegiatan yang menuntut kemampuan membaca, menulis ataupun diskusi mendalam.

Pendampingan belajar di rumah belum berjalan optimal. Orang tua lebih banyak disibukkan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, sehingga waktu untuk membimbing anak belajar menjadi terbatas. Meski demikian, kebutuhan dasar alat belajar seperti buku tulis, seragam dan perlengkapan sekolah lainnya dapat dipenuhi melalui distribusi gratis yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga siswa tidak mengalami hambatan perlengkapan pendidikan.

Partisipasi pendidikan di Kampung Atapo dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural maupun sosial. Beban kerja anak untuk membantu orang tua di kebun atau melaut seringkali mengurangi waktu mereka mengikuti kegiatan belajar. Kondisi akses dan cuaca, terutama saat hujan lebat atau air pasang, turut menjadi kendala yang mempengaruhi kehadiran. Selain itu motivasi belajar anak masih rendah karena hasil

pendidikan belum dirasakan secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, sehingga sekolah kerap dipandang bukan sebagai prioritas utama.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mencakup olahraga dan seni budaya**,** termasuk latihan tarian lokal (tari *seka*). Meskipun sudah berjalan, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan pendamping, sarana, dan frekuensi latihan. Penguatan kegiatan ekstrakurikuler sangat berpotensi meningkatkan kedisiplinan, kreativitas, dan karakter siswa apabila mendapatkan dukungan yang lebih memadai.

5. Pendidikan Nonformal

Kegiatan keaksaraan fungsional di Kampung Atapo hingga saat ini belum tersedia, sehingga warga yang ingin mengikuti program tersebut harus pergi ke ibu kota kabupaten di Timika. Di sisi lain, pelatihan keterampilan bagi masyarakat memang sering diselenggarakan, namun keberlanjutannya masih lemah karena tidak disertai pendampingan lanjutan yang memastikan penerapan hasil pelatihan dalam kegiatan ekonomi atau sosial sehari-hari.

Sementara itu pendidikan keagamaan seperti sekolah minggu dan pengajian berjalan secara rutin di masing-masing komunitas, menjadi ruang pembinaan moral dan spiritual yang penting bagi masyarakat. Seluruh dinamika ini menunjukkan perlunya penguatan layanan pendidikan nonformal dan dukungan pendampingan berkelanjutan agar kapasitas masyarakat dapat tumbuh secara lebih optimal.

Peserta pendidikan nonformal di Kampung Atapo sebenarnya sangat dibutuhkan beragam kelompok masyarakat, seperti pemuda putus sekolah, ibu rumah tangga, pencari kerja, dan warga umum yang membutuhkan peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Namun hingga saat ini tidak terdapat data kuantitatif maupun persentase jumlah peserta karena program pendidikan nonformal belum berjalan secara terstruktur dan tidak terselenggara secara rutin di kampung. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyediaan layanan pendidikan nonformal yang lebih terencana agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit

a. Pemaknaan sehat menurut masyarakat

Masyarakat Kampung Atapo memaknai kesehatan terutama sebagai kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Seseorang dianggap sehat

apabila masih mampu bekerja, pergi ke kebun, mendayung perahu, menangkap ikan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan tugas ekonomi keluarga. Selama tubuh tidak menunjukkan keluhan fisik yang menghambat aktivitas, kondisi tersebut dipahami sebagai sehat. Pemaknaan ini mencerminkan pandangan fungsional terhadap kesehatan, yaitu sehat selama masih bisa bergerak dan berkontribusi bagi keluarga.

Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, masyarakat umumnya memandang kehamilan sebagai karunia alamiah yang akan berlangsung selama "sembilan bulan sepuluh hari" hingga melahirkan. Karena dianggap sebagai proses yang wajar dan tidak memerlukan intervensi medis, sebagian ibu jarang memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau tenaga kesehatan. Rendahnya kunjungan antenatal ini berdampak pada kurangnya pemantauan kondisi ibu hamil dan janin.

Kondisi ini turut berpengaruh pada status gizi anak. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau balita yang kurang gizi seringkali dianggap biasa selama mereka tetap aktif bergerak dan bermain. Dengan kata lain, tanda-tanda kurang gizi tidak selalu dipandang sebagai masalah kesehatan serius karena masyarakat menilai kesehatan dari kemampuan anak untuk beraktivitas, bukan dari indikator medis atau pertumbuhan fisik.

b. Pemaknaan sakit

Masyarakat Kampung Atapo memahami penyakit melalui dua perspektif utama, yaitu sakit secara fisik dan sakit yang berkaitan dengan faktor spiritual atau adat. Pemahaman ini mempengaruhi cara mereka mengenali gejala dan menentukan langkah penanganan.

Sakit fisik dipahami sebagai kondisi yang muncul akibat faktor lingkungan atau kebiasaan hidup sehari-hari. Beberapa keluhan yang umum terjadi antara lain demam atau badan lemas akibat malaria, batuk karena kena debu, serta luka yang terjadi akibat kurang berhati-hati saat beraktivitas di kebun, sungai atau hutan. Penyakit-penyakit ini dianggap wajar karena sering dialami dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya ditangani secara sederhana sebelum mencari pertolongan medis.

Selain penyebab fisik, masyarakat juga meyakini adanya penyakit yang bersumber dari faktor spiritual atau pelanggaran terhadap norma adat. Dalam

perspektif kepercayaan lokal, sakit dapat muncul karena gangguan roh, ketidakseimbangan hubungan dengan alam, atau akibat tindakan yang dianggap melanggar aturan adat. Pada kondisi ini, masyarakat cenderung mencari bantuan tokoh adat atau tokoh agama sebelum atau bersamaan dengan upaya pengobatan medis.

Tanda awal seseorang dianggap mulai sakit biasanya dikenali dari perubahan kondisi tubuh yang dianggap tidak biasa. Badan panas-dingin sering dikaitkan dengan "kena angin lewat" atau "angin jahat", sementara rasa lelah atau pusing dipahami sebagai akibat "salah jalan" ketika bepergian, yaitu berjalan melalui tempat-tempat yang dianggap memiliki energi atau kekuatan tertentu. Pemahaman ini mendorong keluarga untuk melakukan penanganan awal secara tradisional, misalnya dengan pijat, ramuan, atau ritual sederhana, sebelum membawa pasien ke puskesmas.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Akses masyarakat Kampung Atapo terhadap fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Puskesmas hanya tersedia di ibu kota distrik, sementara fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas Pembantu, Poskesdes, maupun Polindes tidak ada di kampung. Satu-satunya layanan kesehatan yang tersedia di tingkat kampung adalah Posyandu, yang menjadi titik utama pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi balita dan ibu hamil. Kendati demikian, layanan Posyandu berlangsung terbatas karena frekuensi kunjungan tenaga kesehatan hanya terjadwal sekali dalam sebulan, bergantung pada kehadiran petugas Puskesmas distrik yang datang ke kampung.

b. Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang melayani masyarakat berasal dari Puskesmas distrik dan terdiri atas perawat, bidan serta tenaga gizi. Tenaga dokter umum tersedia, sehingga pemeriksaan dan penanganan medis dapat dilakukan di tingkat distrik termasuk rujuan ke layanan Kesehatan di atasnya. Kehadiran tenaga kesehatan di Kampung Atapo bersifat berkala sesuai jadwal kunjungan bulanan bersamaan dengan pelayanan posyandu. Kondisi yang menjadi tantangan besar, terutama ketika terjadi kasus sakit mendadak atau kondisi gawat darurat. Keterbatasan transportasi menyebabkan layanan Kesehatan belum aptimal dlakukan. Banyak ibu

hamil baru mencari layanan ketika sudah dalam kondisi darurat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi. Persentase kelahiran di fasilitas kesehatan masih rendah karena sebagian ibu lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung. Berdasarkan pengamatan fisik, kasus stunting dan anemia pada ibu hamil diduga sudah ada di Kampung Atapo, namun belum dilakukan pengukuran atau pemantauan status gizi secara sistematis.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Akses masyarakat Kampung Atapo terhadap pangan bergizi sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar permukiman. Konsumsi lauk hewani terutama dipenuhi dari hasil tangkapan sungai seperti ikan, udang dan kepiting yang relatif mudah diperoleh tanpa biaya. Sementara itu, lauk hewani yang harus dibeli seperti ayam dan telur jarang dikonsumsi karena harganya tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat, masyarakat lebih mengandalkan pangan lokal seperti sagu dari dusun sagu, ubi dari lahan kering, serta sayur hutan yang tersedia secara musiman. Namun, variasi konsumsi ini masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung pemenuhan gizi seimbang.

Selain mengandalkan pangan lokal, masyarakat Atapo juga sangat bergantung pada beras yang diperoleh dari bantuan pemerintah. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan keluarga masih rapuh, terutama ketika pasokan bantuan tidak rutin atau akses transportasi ke Timika terhambat. Kondisi ini berdampak pada pola konsumsi harian yang cenderung sederhana dan kurang bervariasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi lebih optimal.

b. Program gizi

Pelaksanaan program gizi di Kampung Atapo masih menghadapi berbagai keterbatasan. Posyandu balita yang menjadi ujung tombak pelayanan gizi belum mampu menerapkan sistem lima meja secara optimal akibat kurangnya tenaga terlatih dan peralatan pendukung. Kegiatan penimbangan berat badan tetap dilakukan setiap kunjungan, namun cakupannya rendah karena tidak semua ibu membawa anak secara rutin. Meskipun demikian, Pemberian Makanan Tambahan

(PMT) hampir selalu dilaksanakan ketika ada bahan atau dukungan dari petugas kesehatan. Menu PMT umumnya sederhana, disesuaikan dengan bahan pangan yang tersedia di kampung, dan lebih bersifat mengisi energi daripada memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Pengetahuan gizi keluarga di Kampung Atapo masih terbatas sehingga pola konsumsi rumah tangga cenderung sederhana dan kurang bervariasi. Pengolahan makanan tidak membedakan kebutuhan berdasarkan usia; balita dan orang dewasa sering mengkonsumsi menu yang sama, umumnya terdiri atas nasi dan lauk tanpa sayur. Kebiasaan makan bersama keluarga juga belum menjadi tradisi yang kuat, dan balita biasanya disuapi oleh ibu tanpa memperhatikan porsi maupun kandungan zat gizi.

Selain itu, terdapat beragam mitos atau pantangan makanan yang mempengaruhi pola makan ibu hamil. Beberapa makanan seperti penyu *(teteruga)* dipercaya dapat menyebabkan anak lahir dengan kaki berbentuk O, udang dianggap membuat bayi terkena cacar air, daging buaya diyakini menyebabkan bayi yang dilahirkan kelebihan jari, sedangkan tikus tanah dipercaya membuat bayi lahir dengan telinga panjang. Kepercayaan ini menyebabkan ibu hamil menghindari sumber protein hewani tertentu, sehingga asupan gizi menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan anemia maupun gangguan pertumbuhan janin.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Sumber pangan lokal di Kampung Atapo sebagian besar berasal dari dusun sagu**,** tempat masyarakat mengambil tepung sagu sebagai makanan pokok. Masyarakat tidak memiliki kebun keluarga yang dikelola secara khusus, sehingga pemenuhan sayur-sayuran bergantung pada hasil alam yang tersedia atau pembelian dari luar kampung. Sumber pangan dari perairan cukup melimpah, termasuk berbagai jenis ikan sungai, udang dan kepiting yang menjadi sumber protein utama masyarakat.

Namun terkait dengan ketahanan pangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Pada saat pasang air besar, air masuk ke rumah-rumah sehingga aktivitas memasak dan pengolahan sagu terganggu. Kondisi ini sering menjadi masa sulit pangan karena tanaman sayuran tidak dapat tumbuh subur di lingkungan

yang tergenang, sehingga masyarakat harus membeli sayuran dari Kota Timika dengan biaya yang lebih tinggi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lokal masih rentan dan sangat bergantung pada faktor musim dan akses transportasi.

4. Keluarga Berencana (KB)

a. Pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana

Masyarakat Kampung Atapo pada dasarnya memahami bahwa program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sehari-hari, terutama bagi keluarga-keluarga suami-sitri pasangan usia subur. Banyak keluarga masih memiliki jumlah anak yang besar dan jarak kelahiran yang relatif dekat, sehingga berkontribusi pada tingginya risiko kehamilan berulang dan kasus bayi berat lahir rendah (BBLR).

Walaupun beberapa PUS sudah menjadi akseptor dengan menggunakan kontrasepesi KB, namun sebagian masyarakat dan PUS memandang penggunaan alat kontrasepsi sebagai sesuatu yang kurang selaras dengan nilai adat atau kepercayaan, khususnya karena dianggap sebagai “benda asing” yang dimasukkan ke dalam tubuh. Pandangan ini secara tidak langsung menghambat penerimaan metode kontrasepsi modern, terutama pada kelompok usia muda dan ibu yang baru melahirkan.

b. Akses terhadap layanan keluarga berencana

Akses layanan KB di Kampung Atapo hanya tersedia melalui Puskesmas Kokonau yang menyediakan alat kontrasepsi serta tenaga kesehatan yang bertugas memberikan penyuluhan dan layanan pemasangan. Meskipun fasilitas dasar relatif tersedia, jarak, keterbatasan kunjungan layanan bergerak, dan minimnya intensitas penyuluhan menyebabkan pemanfaatan layanan KB belum optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan layanan KB dengan tingkat penggunaannya di masyarakat dengan cakupan peserta KB aktif yang rendah.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Kampung Atapo berkisar antara 3-6 orang, mencerminkan pola keluarga besar yang masih kuat secara budaya. Dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak secara umum tinggi, namun tetap

dipengaruhi oleh peran gender tradisional. Ibu memikul tanggung jawab ganda sebagai pihak yang melahirkan (fungsi reproduksi) sekaligus sebagai tenaga produktif dalam keluarga, sementara peran laki-laki cenderung lebih pasif dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi dan pengasuhan. Kondisi ini sangat mempengaruhi dinamika keluarga dan frekuensi kelahiran, sehingga upaya penataan kembali peran keluarga dan peningkatan kesadaran KB menjadi penting bagi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kampung Atapo.

F. Ekonomi Masyarakat

1. Aktivitas Penduduk

Pola kerja masyarakat Atapo masih didominasi oleh aktivitas tradisional, seperti berkebun dalam skala kecil, mencari hasil hutan, serta menangkap ikan, udang dan kepiting dengan peralatan sederhana. Jam kerja sebagian besar penduduk bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan ritme alam. Para nelayan biasanya beraktivitas pada dini hari hingga pagi, sedangkan petani atau pekebun bekerja sejak pagi hingga siang. Kegiatan berbasis sektor formal hampir tidak tampak, sehingga beban ekonomi keluarga banyak bertumpu pada aktivitas informal yang pendapatannya tidak tetap. Lokasi kerja pun umumnya berada di sekitar lingkungan kampung, baik di sungai, pesisir maupun lahan garapan.

Sebagian penduduk juga memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga, seperti membuat kerajinan sederhana, memanen sagu secara musiman, atau menjual hasil laut dalam skala kecil. Pemuda sering terlibat sebagai tenaga bantu dalam kegiatan konstruksi kampung, perbaikan fasilitas umum, atau membantu orangtua di sektor perikanan lokal. Sementara itu, anak perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga turut melakukan aktivitas pendukung seperti mengolah hasil tangkapan, menyiapkan logistik untuk aktivitas melaut, serta terlibat dalam kegiatan ekonomi kecil seperti berdagang makanan. Kombinasi aktivitas utama dan sampingan ini menunjukkan bahwa struktur penghidupan masyarakat Atapo masih bersifat campuran antara tradisional dan modern, dengan ketergantungan yang tinggi pada sektor informal dan sumber daya alam sekitar.

2. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif di Kampung Atapo masih didominasi aset tradisional seperti perahu kayu, jaring sederhana, alat pancing, serta perkakas manual

untuk berkebun dan berburu. Sebagian kecil keluarga penduduk lokal memiliki perahu motor johnson 15-PK terutama yang pengadaannya diperoleh melalui alokasi dana desa, khusus kios-kios yang mendukung aktivitas perdagangan terutama penduduk migran. Kapasitas produksi masyarakat masih bergantung pada peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga.

Kepemilikan aset rumah tangga juga bervariasi antar-warga. Mayoritas keluarga terutama memiliki telepon seluler untuk berkomunikasi, namun tidak semuanya memiliki peralatan dasar rumah tangga. Khusus penduduk migran memiliki alat elektronik berdaya besar seperti televisi, parabola indovision, kulkas atau genset.

Sumber modal usaha sebagian besar berasal dari tabungan keluarga atau bantuan internal kelompok seperti kelompok tani dan nelayan. Akses masyarakat terhadap pinjaman formal masih rendah, sehingga dukungan pemerintah berupa bantuan perahu, jaring atau modal ekonomi desa menjadi sumber tambahan bagi pengembangan usaha kecil. Modal usaha yang berkembang biasanya bersifat sederhana dan dikelola untuk kebutuhan harian.

Pola pengelolaan modal masih berorientasi pada keberlangsungan kebutuhan dasar, sehingga keberlanjutan modal sering terhambat oleh pendapatan yang tidak stabil dan ketergantungan pada kondisi alam. Ketimpangan kepemilikan modal tetap terlihat, terutama antara keluarga nelayan produktif yang memiliki perahu motor tempel (speedboat dan longboat) dengan keluarga yang mengandalkan alat tangkap tradisional. Meski demikian praktik gotong royong membantu menjaga keseimbangan sosial dalam penghidupan masyarakat.


Perahu motor tempel milik warga (dok.ippm)

3. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di Kampung Atapo ditopang oleh keberadaan tujuh (7) kios yang dikelola oleh penduduk migran. Kios-kios ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama karena menyediakan barang sehari-hari yang mudah dijangkau dan dibeli tanpa harus bepergian ke pusat kota distrik. Ketersediaannya membantu menjaga stabilitas pasokan di tingkat kampung. Namun



Kios dalam Kampung Atapo (dok.ippm)



Para-para tempat jualan (dok.ippm)

sistem transaksi di seluruh kios bersifat tunai karena tidak menerima pembelian secara bon atau pembayaran tertunda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi keluarga berpendapatan tidak tetap.

Selain itu keberadaan layanan keuangan melalui Bank Papua, khususnya Kas Bank Papua Kokonau yang berkedudukan di Atapo menjadi indikator penting dinamika ekonomi kampung. Kehadiran bank di tingkat lokal mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari penarikan tunai, penyimpanan, hingga layanan transfer yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pergerakan barang di pelabuhan. Tingginya frekuensi transaksi harian mencerminkan bahwa Atapo memiliki arus ekonomi yang hidup, didorong oleh mobilitas penduduk, aktivitas bongkar muat, serta interaksi dagang antara warga kampung dan pendatang.

Kas Bank Papua berfungsi tidak hanya sebagai pusat layanan keuangan, tetapi juga sebagai penopang kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi formal, yang memungkinkan sirkulasi uang berjalan lebih aman dan teratur di tengah perkembangan Atapo sebagai kawasan pelabuhan yang terus tumbuh, apalagi saat ini pemerintah kabupaten telah dibangun jembatan terapung sebagai tambahan perahu sudah pasti akan mendorong mobilitas dan akitivitas penduduk kampung maupun dari luar kampung yang berkepentingan dengan pemerintahan distrik Mimika Barat.



Kantor Kas Bank Papua Atapo (dok.ippm)

Tingkat keaktifan lembaga ekonomi di kampung relatif stabil, tetapi partisipasi warga dalam mengembangkan atau memperluas kegiatan ekonomi masih terbatas.

Minimnya dukungan eksternal dari pemerintah, lembaga CSR perusahaan, maupun organisasi keagamaan membuat kapasitas kelembagaan ekonomi di Atapo belum berkembang optimal. Bantuan atau program yang pernah hadir umumnya bersifat sporadis dan tidak disertai pendampingan berkelanjutan, sehingga tidak menghasilkan penguatan ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah dan berkesinambungan untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis kebutuhan masyarakat Atapo.

4. Harga Barang dan Bahan Makanan

Harga bahan pokok di Kampung Atapo umumnya lebih tinggi dibandingkan di kota Timika karena faktor transportasi, jarak pengiriman, serta ketergantungan pada pasokan dari luar kampung. Barang-barang kebutuhan rumah tangga sebagian besar dipasok melalui jalur laut dan Sungai menuju Pelabuhan Atapo, kemudian didistribusikan ke kios-kios lokal. Kondisi ini menyebabkan harga cenderung fluktuatif sepanjang tahun, terutama pada musim gelombang tinggi ketika mobilitas kapal terbatas dan biaya angkut meningkat.

Stabilitas harga bahan pokok di Kampung Atapo sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi barang dari Kota Timika sebagai pusat pasokan utama. Sepanjang tahun, harga cenderung fluktuatif, terutama pada musim gelombang tinggi ketika kapal pengangkut sulit beroperasi. Pada periode cuaca buruk atau ketika pasokan terlambat tiba, harga komoditas dapat meningkat secara signifikan karena ketersediaan barang menurun serta bila adanya pencaitan dana kampung maupun bantuan sosial. Sebaliknya, ketika jalur transportasi laut beroperasi normal dan pasokan masuk secara rutin, harga relatif stabil dan lebih mudah dijangkau masyarakat. Faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya harga termasuk biaya transportasi laut, jarak pengiriman, serta jenis komoditas yang sebagian besar tidak diproduksi secara lokal.

Dibandingkan dengan harga di Kota Timika, rata-rata harga bahan pokok di Kampung Atapo lebih tinggi sekitar 10-30 persen. Selisih ini terutama terlihat pada barang-barang seperti beras, minyak goreng, telur dan gula yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar kampung. Perbedaan harga tersebut tidak hanya disebabkan biaya angkut, tetapi juga risiko distribusi yang lebih besar akibat kondisi geografis pesisir yang dipengaruhi musim dan cuaca. Situasi ini memperkuat posisi

kios-kios lokal sebagai penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan pasar-pasar di kota Timika.

Kisaran harga bahan pokok yang umum dijual di Kampung Atapo sebagai berikut:

Tabel 3.8
Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah
Di Kampung Atapo Tahun 2025

No.	Jenis Komoditas	Harga (Rp)/Satuan	Keterangan
I	Sayuran, buah, ubi, hasil laut		
01.	Kangkung dan bayam	5.000/ikat	Kecil/besar
02.	Tomat	5.000/tumpuk	
03.	Cabe	5.000/tumpuk	
04.	Pisang	20.000/sisir	Kecil/besar
05.	Ubi-ubian	50.000/tumpuk	
06.	Sagu	30.000/potong	
07.	Ikan basah	15.000/ekor	
08.	Udang Laut	45.000/kg	
09.	Udang Kali	3.000/ekor	
10.	Karaka	30.000/ekor	
II	Jenis sembilan bahan pokok		
01.	Beras	18.000/kg	
02.	Gula pasir	25.000/kg	
03.	Garam	9.000/bungkus	
04.	Minyak goreng	30.000/liter	
05.	Minyak tanah	15.000/liter	
06.	Susu kaleng	12.000/kaleng	Cap Nona
07.	Supermi	5.000/bungkus	
08.	Kopi	8.000/bungkus	
09.	Telur	5.000/buah	
10.	Sabun	5.000/batang	
III	Jenis rokok		
01.	Gudang garam filter kecil	35.000/bungkus	
02.	Gudang garan filter besar	45.000/bungkus	
03.	Shag jenis anggur Kupu	8.000/bungkus	
04.	TROY	35.000/bungkus	
IV	Pakain dan alat tulis		
01.	Baju T-shirt	60.000/buah	*All Size*
02.	Kemeja	60.000/buah	
03.	Kain sarung	50.000/buah	
04.	Buku tulis	3.000/buah	
05.	Bolpoint	5.000/buah	
06.	Pensil	3.000/buah	
V	Jenis usaha pertanian		
01.	Kelapa	1.000/buah	
VI	Jenis bahan bakar minyak (BBM)		
01.	Bensin	18.000/liter	
02.	Minyak tanah	15.000/liter	

Sumber: Data Primer, 2025

Akses warga kampung Atapo terhadap pasar sangat mudah, dimana seluruh kebutuhan harian dipenuhi melalui kios yang tersebar di kampung. Apabila warga

ingin membeli barang dalam jumlah lebih besar atau mencari harga yang lebih murah, mereka harus menuju Kota Timika dengan perjalanan laut selama 60-90 menit tergantung gelombang dan kondisi cuaca. Selain memerlukan waktu, perjalanan tersebut membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi, sehingga tidak semua keluarga memilih opsi tersebut. Bagi sebagian besar rumah tangga, membeli langsung di kios lokal menjadi pilihan paling praktis meskipun harganya relatif lebih mahal. Keterbatasan akses inilah yang menjadikan kios sebagai lembaga ekonomi yang sangat vital dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Kampung Atapo.

5. Potensi dan Peluang Ekonomi

Kampung Atapo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama sagu, ikan, kepiting, udang, serta hasil kebun dan hasil hutan non-kayu. Potensi budaya seperti kerajinan tangan dan kuliner berbahan dasar sagu juga menjadi kekuatan lokal yang dapat dikembangkan sebagai identitas ekonomi dan sosial masyarakat. Peluang ekonomi yang dapat ditumbuhkan meliputi ekowisata yang menjanjikan dengan agroforestri berbasis sagu dan tanaman lokal, budidaya ikan di perairan sekitar, pengembangan UMKM olahan pangan, serta jasa transportasi kampung yang mendukung mobilitas barang dan orang di pelabuhan. Meskipun demikian, sebagian besar potensi ini belum tergarap optimal karena keterbatasan pengetahuan pengolahan, kurangnya sarana pendukung, serta akses pasar yang masih terbatas.



Potensi ekowisata lokal (dok.ippm)

Tantangan pengembangan ekonomi juga diperkuat oleh minimnya dukungan eksternal, baik dari pemerintah maupun perusahaan yang selama ini belum berjalan secara konsisten dan belum disertai pendampingan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi lokal masih berada pada tahap dasar, sehingga memerlukan intervensi terarah agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat kampung Atapo.

6. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Atapo secara umum masih berada pada kategori rendah. Rata-rata pendapatan rumah tangga berada di bawah

Rp1.000.000,- per bulan**,** sehingga masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025 yang ditentukan sebesar Rp.1.099.143,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga memiliki daya beli yang terbatas serta menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Sebaran tingkat kesejahteraan antar rumah tangga maupun antar-kelompok warga relatif seragam, dengan mayoritas penduduk hidup dalam kondisi miskin. Pengecualian terjadi pada sebagian kecil penduduk migran yang memiliki usaha kecil seperti kios dan memperoleh pendapatan tetap, sehingga berada pada kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan warga asli kampung. Meski jumlahnya tidak banyak, keberadaan kelompok ini turut membentuk dinamika ekonomi lokal.

Akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar juga masih sangat terbatas. Keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama mobilitas warga. Layanan pendidikan hanya tersedia hingga jenjang SD di kampung, sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus menempuh perjalanan lebih jauh ke pusat distrik. Layanan kesehatan pun tidak tersedia secara rutin di kampung; fasilitas kesehatan terdekat berada di tingkat distrik, sementara transportasi reguler tidak tersedia, sehingga masyarakat harus berjalan kaki dan jika mendesak terpaksa mengandalkan moda transportasi becak motor (bentor).

Dalam hal konsumsi rumah tangga, sebagian besar keluarga mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan sederhana untuk sekadar mengenyangkan perut, dengan pola makan rata-rata dua kali sehari**.** Menu sehari-hari berbasis bahan lokal seperti sagu, ikan, dan hasil kebun, sementara biaya pendidikan dasar relatif tidak menjadi beban karena pemerintah menyediakan layanan gratis**.**

Berbagai program perlindungan sosial di kampung Atapo seperti PKH, BLT dan bantuan sosial, belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat yang berhak. Ketidakmerataan ini terutama disebabkan oleh lemahnya kepatuhan administrasi kependudukan, karena sebagian warga belum memiliki dokumen identitas (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang lengkap, sehingga tidak dapat terdaftar dalam basis data penerima bantuan.

Perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung Atapo selama 5-10 tahun terakhir relatif stagnan. Tidak terdapat peningkatan signifikan yang mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Faktor geografis,

aksesibilitas yang rendah, serta terbatasnya peluang ekonomi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Kampung Atapo.

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Situasi keamanan di Kampung Atapo pada umumnya tergolong kondusif, meskipun sesekali terjadi gangguan yang bersifat lokal dan tidak berulang secara intens. Jenis gangguan keamanan yang pernah muncul meliputi perkelahian antarwarga, perusakan ringan, serta konflik dalam rumah tangga yang dipicu persoalan internal keluarga. Masalah konsumsi alcohol (miras) baik minuman beralkohol dari luar maupun minuman lokal seperti *bobo* menjadi salah satu pemicu utama yang mempengaruhi perilaku sebagian warga terutama kelompok anak muda, sehingga menimbulkan kerawanan sosial tertentu. Di sisi lain, kasus kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak juga pernah terjadi, meskipun jumlahnya sangat terbatas dan umumnya berkaitan dengan tekanan rumah tangga, kecemburuan atau persoalan ekonomi.

Gangguan yang bersumber dari alam juga tercatat dalam intensitas yang sangat rendah, seperti ancaman ular atau buaya yang muncul saat warga beraktivitas di sungai atau hutan, serta risiko digigit ulat saat meramu hasil hutan. Meskipun frekuensinya jarang, kejadian-kejadian ini tetap menimbulkan rasa khawatir bagi warga yang bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan harian. Kampung Atapo sendiri tidak memiliki lokasi yang dikategorikan sebagai daerah rawan keamanan, gangguan biasanya terjadi secara sporadis dan tidak terikat waktu tertentu.

Pihak yang paling rentan menjadi korban beragam jenis gangguan keamanan adalah anak muda yang terpapar konsumsi miras, perempuan dan anak yang menghadapi potensi kekerasan dalam rumah tangga, serta warga yang bekerja di hutan atau daerah perairan. Faktor penyebab utamanya meliputi konsumsi alkohol, konflik emosional dalam keluarga, minimnya pengawasan, serta kondisi lingkungan yang dekat dengan habitat satwa liar.

Dampak dari kejadian-kejadian ini umumnya berupa munculnya rasa takut, rasa tidak aman dan kehati-hatian berlebih pada warga. Meski demikian, dengan dukungan sosial internal yang baik serta mekanisme penyelesaian informal yang masih berjalan,

kondisi keamanan Kampung Atapo secara keseluruhan tetap stabil dan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Keamanan di Kampung Atapo dikelola melalui kelembagaan lokal yang melibatkan Hansip (Linmas) sebagai garda terdepan, didukung oleh keberadaan Pos Komando Rayon Militer (Koramil) 1710-01/Kokonau yang berkedudukan di wilayah kampung ini. Struktur ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan skala kecil. Dalam praktiknya, sebagian besar persoalan sosial dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme komunikasi dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, serta unsur Linmas. Penyelesaian masalah biasanya dilakukan secara cepat dan kekeluargaan untuk menghindari eskalasi serta menjaga harmoni antar warga.



Pos Koramil Mimika Barat di Atapo (dok.ippm)

Upaya pencegahan gangguan keamanan umumnya ditempuh melalui peningkatan komunikasi sosial, pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Linmas, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan imbauan terkait ketertiban, terutama pada momen-momen yang berpotensi menimbulkan kerawanan seperti acara adat, konsumsi alkohol atau perselisihan keluarga.

Beberapa tantangan masih dihadapi, terutama karena letak Pos Polisi Sektor (Polsek) Mimika Barat cukup jauh dari Kampung Atapo. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pelayanan penanganan apabila terjadi kejadian yang membutuhkan campur tangan kepolisian, sehingga penguatan kapasitas keamanan lokal dan koordinasi dengan Koramil menjadi aspek yang penting untuk memastikan keamanan kampung tetap terjaga.

H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

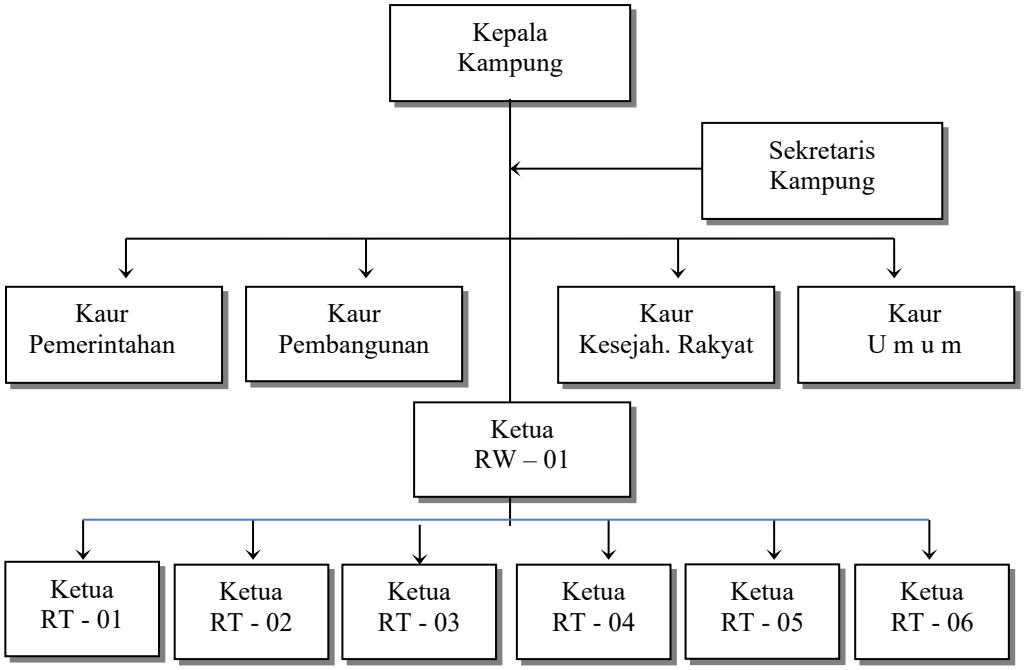
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kampung Atapo dipimpin oleh seorang Kepala Kampung (Gabriel Matamoa) yang dibantu oleh Sekretaris Kampung (Ridwan

Kamaruddin), para Kepala Urusan (Kaur) meliputi Kaur Keuangan (Hans Maryen), Kaur Pemerintahan (Plasidus Akimuri), Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan (Hans Ewakipeyauta), dan Kaur Perencanaan dan Umum (Constan Matamoa).

Perangkat kewilayahan yang terdiri atas Kepala Dusun (Frans Potarepea), Ketua RW (Antonius Take) dan 6 Ketua RT yaitu RT-1 (Theresia Matamoa), RT-2 (Yubelina Mautipiyu), RT-3 (Alex Andanay), RT-4 (Fidelis Kemaupia), RT-5 (Nobertus Yatenea) dan RT-6 (Paskalis Kameraru).

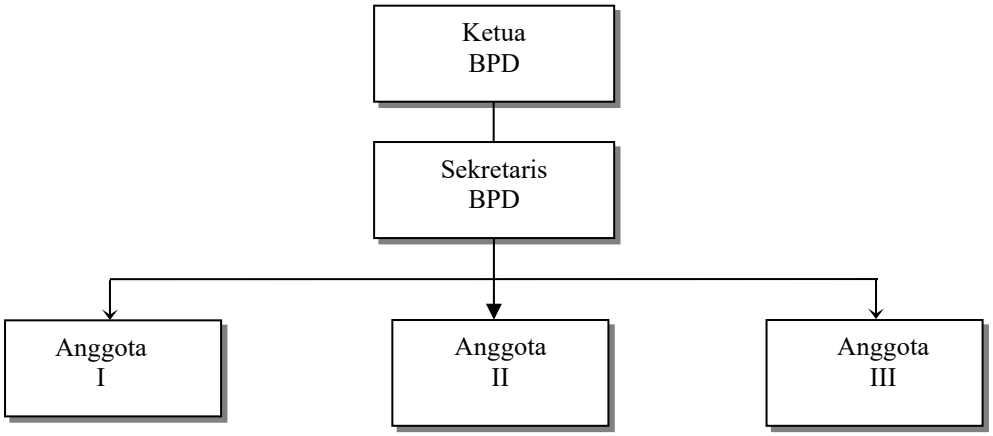
Struktur tata kelola pemerintahan kampung Atapo yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan layanan dasar, pembangunan, serta koordinasi dengan masyarakat di tingkat paling bawah sebagaimana struktur berikut ini:

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Atapo



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, terdiri dari Ketua (Dinisius Potarapea), Sekretaris (Adrianus Syorer), dengan 3 orang Anggota-1 (Yuspina Kemaupia), Anggota-2 (Yermias Tikir) dan Anggota-3 (Yubelina Mautiayu). Adapun struktur BPD di kampung Atapo sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Atapo



2. Lembaga Kemasyarakatan

Kampung Atapo memiliki struktur kelembagaan sosial yang berfungsi penting dalam menjaga keharmonisan dan kohesi masyarakat. Kelembagaan adat tetap hadir sebagai rujukan utama dalam pengaturan norma kehidupan, penyelesaian sengketa kecil, serta menjaga nilai-nilai budaya setempat. Peran tokoh adat masih dihormati, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan hubungan antarwarga, pelestarian tradisi, dan penguatan identitas komunitas. Walaupun menjalankan fungsi yang lebih bersifat sosial-kultural, lembaga adat menjadi salah satu pilar yang menjaga stabilitas sosial di tingkat kampung.

Di samping itu, kelembagaan agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas warga Kampung Atapo beragama Katolik dan tergabung dalam satu Komunitas Basis atau Kombas (Kombas St. Petrus) yang bernaung di bawah Gereja Paroki Maria Bintang Laut. Kombas menjadi wadah pembinaan iman sekaligus sarana mempererat hubungan sosial antarwarga melalui kegiatan ibadah rutin, ibadah sabda, serta agenda khusus seperti Rorasio pada bulan Mei dan devosi kepada Maria pada bulan Oktober. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Kombas sangat tinggi, menunjukkan kuatnya solidaritas dan kebersamaan di antara warga.

Kolaborasi antar lembaga adat, agama dan pemerintah kampung terjalin dengan baik, terutama dalam mendukung program sosial-keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah kampung turut memberikan dukungan terhadap kegiatan Kombas, mengingat mayoritas penduduk kampung Atapo beragama Katolik dan aktif

berperan dalam penguatan nilai-nilai moral serta ketertiban sosial. Kerjasama antar lembaga ini memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang rukun, toleran dan saling mendukung. Secara keseluruhan, keberadaan kelembagaan adat dan agama di Kampung Atapo menjadi fondasi penting bagi ketahanan sosial, memperkuat integrasi masyarakat, serta menjadi motor penggerak kegiatan kolektif yang meningkatkan kualitas hidup warga kampung Atapo.

3. Lembaga Politik

Masyarakat Kampung Atapo menunjukkan perilaku politik yang cukup matang dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Warga turut hadir menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, mencerminkan kesadaran politik yang terus berkembang serta komitmen terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Pelaksanaan pemilu berjalan lancar berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, yaitu lembaga penyelenggara pemilu (KPU Mimika, PPD Distrik Mimika Barat, dan KPPS kampung Atapo), bersama pemerintah kampung, tokoh adat, serta perwakilan partai politik. Sinergi ini menciptakan suasana kondusif, memastikan setiap tahapan pemilu terlaksana sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi. Kolaborasi tersebut juga berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban dan transparansi proses pemungutan serta penghitungan suara di Kampung Atapo.

4. Lembaga Kamtibmas

Kelembagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Atapo ditopang oleh keberadaan Lembaga Kamtibmas melalui Kamra dan Linmas yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial kampung. Lembaga ini terlibat langsung dalam pengamanan kegiatan masyarakat, pengawasan lingkungan, serta pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun pada momen tertentu seperti kegiatan adat, keagamaan, dan agenda pemerintahan kampung. Keaktifan Kamra dan Linmas mencerminkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga rasa aman, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung terselenggaranya kehidupan kampung yang tertib, kondusif dan harmonis.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi dan Komunikasi

a. Akses jalan dan infrastruktur dasar

Aksesibilitas darat di Kampung Atapo ditunjang oleh keberadaan jalan poros distrik (jalan Cenderawasih) berupa jalan beton oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas PU. Jalan poros ini memiliki lebar sekitar 3 meter dan berfungsi sebagai jalur utama mobilitas warga. Selain itu sebagian besar jalan lingkungan di kampung Atapo juga telah membuat jalan beton dengan panjang jalan yang berhasil dibuat sepanjang 208 meter dengan lebar 2 meter. Kondisi jalan kampung umumnya baik, namun belum seluruhnya tersambung sehingga pada beberapa titik masih terdapat ruas yang membutuhkan peningkatan untuk mendukung kelancaran pergerakan masyarakat.



Dermaga Kokonau di Atapo (dok.ippm)



Tambatan perahu masyarakat (dok.ippm)

Di wilayah pesisir, Kampung Atapo dilengkapi dermaga umum sebagai akses keluar-masuk kapal barang. Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Mimika telah membangun jembatan terapung yang difungsikan sebagai tambatan perahu, sehingga mempermudah aktivitas bongkar muat serta mobilitas harian warga yang mengandalkan transportasi laut.

b. Moda transportasi masyarakat

Moda transportasi darat di kampung ini masih bersifat sederhana, mengingat kondisi geografis dan ketiadaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor maupun mobil. Warga umumnya memanfaatkan becak bermotor (bentor) dan gerobak

dorong untuk mengangkut barang kebutuhan sehari-hari di dalam kampung. Untuk aktivitas ekonomi dan perjalanan antar lokasi, masyarakat mengandalkan perahu atau longboat menggunakan motor tempel (johnson) yang selain dipakai untuk mencari ikan, juga menjadi sarana utama menuju Pomako dan Kota Timika. Kapal barang yang membawa kebutuhan kios dan material bangunan rutin melakukan bongkar muat di dermaga umum, sehingga memperkuat rantai pasok lokal. Transportasi udara pada prinsipnya tersedia melalui Bandara Kokonau di Apuri, namun tidak beroperasi secara reguler. Layanan penerbangan lebih banyak dilakukan melalui sistem carter, khususnya saat ada kunjungan pemerintah atau lembaga tertentu. Masyarakat sendiri jarang menggunakan transportasi udara dan lebih memilih jalur laut karena biaya yang lebih terjangkau.



Bentor atau Becak motor (dok.ippm)



Perahu Loangboat mesin 40 PK (dok.ippm)

c. Konektivitas antar kampung dan distrik

Konektivitas antara Kampung Atapo dan kampung-kampung sekitar cukup baik, dengan waktu tempuh berkisar antara 5-20 menit berjalan kaki. Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pergerakan antar kampung, kecuali ketika hujan deras bersamaan dengan pasang air laut besar. Pada kondisi tersebut, sebagian jalan tergenang air sehingga akses sementara terputus. Namun setelah air surut, jalur kembali dapat dilalui seperti biasa. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan siklus musiman yang mempengaruhi mobilitas warga terutama pada area yang berada lebih rendah dan dekat pesisir.

d. Transportasi umum

Hingga kini, Kampung Atapo belum memiliki layanan transportasi umum rutin seperti angkutan kampung atau perahu reguler. Tidak tersedia armada angkot maupun perahu penumpang yang beroperasi terjadwal. Meski demikian, perjalanan

laut dapat dilakukan apabila ada penumpang dengan biaya sekitar Rp.500.000 per orang untuk sekali jalan. Ketidakhadiran transportasi umum reguler menuntut masyarakat untuk berkoordinasi secara mandiri apabila membutuhkan perjalanan keluar kampung.

e. Komunikasi dan telekomunikasi

Ketersediaan layanan telekomunikasi di Kampung Atapo terbilang memadai dengan adanya jaringan seluler 4G dari operator yang cakupannya diperkuat oleh pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di kampung ini untuk melayani Distrik Mimika Barat. Akses internet terhubung melalui perangkat *straling* yang dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah kampung untuk menunjang komunikasi serta layanan administrasi. Namun demikian, fasilitas radio komunikasi darurat belum tersedia, sehingga kampung masih bergantung sepenuhnya pada jaringan seluler untuk keadaan biasa maupun mendesak.



Penggunaan Seluler HP (dok.ippm)

2. Air Bersih dan Sanitasi

Sumber air bersih masyarakat Kampung Atapo selama ini berasal dari sumur gali yang dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, meskipun sumur tersebut kerap tergenang air laut saat pasang sehingga kualitasnya menurun. Selain itu, warga juga memanfaatkan air sungai untuk keperluan serupa. Untuk kebutuhan air minum dan memasak, masyarakat mengadalkan air hujan dan menjadi sumber utama sepanjang tahun. Saat ini pemerintah kabupaten telah memasang jaringan pipa dari menara air bersih di Kokonau menuju Kampung Atapo, dan rencana difungsikan setelah peresmian. Dari segi kualitas air hujan layak konsumsi, meskipun tetap memerlukan proses perebusan yang belum sepenuhnya menjadi kebiasaan warga. Sementara air sumur bersifat keruh sehingga harus melalui proses penyaringan dan pengendapan sebelum digunakan.


Jaringan Pipa Air Bersih (dok.ippm)

Sistem distribusi air bersih yang telah terpasang di kampung Atapo diharapkan segera dioperasikan, meskipun jaringan tersebut baru tersedia pada beberapa titik umum di dalam kampung. Warga sebagian besar menggunakan 2-3 bak penampung air rumah tangga berupa profil tank berkapasitas 500-1.000 liter yang diperoleh melalui dukungan dana desa. Selain itu bak penampungan air bersih umum yang pernah dibangun kini sudah tidak berfungsi. Kondisi sanitasi lingkunganpun masih terbatas, sebagian besar rumah tangga menggunakan jamban cemplung atau septik tank sederhana dari drum bekas yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025, membangun enam unit MCK permanen sebagai fasilitas percontohan untuk meningkatkan kualitas sanitasi warga.

Pengelolaan sampah di Kampung Atapo belum berjalan optimal karena tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), sehingga sampah rumah tangga umumnya dibakar dan belum dikelola secara berkelanjutan. Selain itu kampung ini belum memiliki sistem drainase, sehingga pada musim hujan sering terjadi genangan air dan meningkatkan risiko banjir di beberapa titik permukiman. Secara keseluruhan kondisi air bersih, sanitasi dan pengelolaan lingkungan di Kampung Atapo masih memerlukan dukungan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan sehat dan layak huni bagi seluruh warga.

3. Penerangan

Sistem penerangan di Kampung Atapo umumnya telah terlayani oleh listrik PLN menggunakan mesin dissel, dengan mekanisme token prabayar yang digunakan hampir di seluruh rumah penduduk. Meskipun demikian masih terdapat beberapa rumah yang memperoleh listrik secara paralel dari tetangga karena keterbatasan ekonomi. Sebagai cadangan sebagian warga memanfaatkan genset ketika pasokan listrik PLN mengalami pemadaman, terutama pada malam hari. Durasi layanan listrik PLN di kampung ini berlangsung selama 12 jam, yakni mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIT, dan jadwal tersebut dapat berubah apabila terjadi banjir rob atau kendala teknis lain yang


PJU dengan Listrik Sel Surya (dok.ippm)

mempengaruhi operasional jaringan.Kondisi jaringan listrik pada umumnya cukup stabil, namun durasi aliran listrik dapat terganggu apabila terjadi kekurangan atau keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit, yang kadang menyebabkan layanan dipersingkat atau bahkan dimatikan selama beberapa hari hingga pasokan kembali normal. Kapasitas daya listrik rumah tangga di Kampung Atapo bervariasi, warga lokal rata-rata menggunakan daya 450-900 watt, sementara para pedagang umumnya memakai kapasitas yang lebih besar yakni 900-1.300 watt untuk mendukung aktivitas usaha. Sebagai pelengkap sumber energi, pemerintah distrik telah memasang panel surya pada sejumlah fasilitas publik dan sepanjang jalan utama kampung, sehingga membantu menjaga ketersediaan penerangan luar ruang.



SPBU Pertamina di Atapo (dok.ippm)

4. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kampung Atapo ditandai dengan keberadaan satu unit bangunan Sekolah Dasar Negeri yang cukup representatif, terdiri atas enam ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, serta rumah guru yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Akses menuju sekolah masih bergantung pada jembatan darurat sehingga memerlukan peningkatan untuk menjamin kelancaran mobilitas peserta didik. Hingga saat ini belum tersedia unit PAUD/TK, SMP, maupun SMA di dalam kampung sehingga layanan pendidikan formal tingkat lanjutan harus diakses di kampung lain dalam distrik Mimika Barat. Kondisi bangunan SD Negeri Atapo secara umum dalam kategori baik, meskipun terdapat beberapa bagian yang memerlukan perawatan dan penataan ulang untuk meningkatkan kenyamanan belajar.

Tenaga pendidik yang bertugas di SD Negeri Atapo berjumlah lima orang yang terdiri atas guru berstatus ASN dan honorer. Seluruh guru telah difasilitasi rumah dinas sehingga dapat menetap dan menjalankan tugas secara lebih optimal. Dari sisi akses pendidikan, lokasi sekolah sangat dekat dengan permukiman warga sehingga anak-anak dapat menempuh perjalanan hanya dalam waktu 2-5 menit dengan berjalan kaki. Program belajar nonformal masih terbatas; kegiatan sekolah minggu dilaksanakan di Gereja Paroki Maria Bintang Laut di Kampung Migiwia, sedangkan pelatihan

keterampilan bagi masyarakat hanya sesekali dilakukan dan belum memiliki tindak lanjut yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana penunjang pendidikan di Kampung Atapo masih relatif terbatas, terutama dalam hal perpustakaan sekolah, alat peraga pembelajaran dan fasilitas belajar lainnya. Meskipun demikian, jaringan internet di sekolah cukup baik berkat penggunaan perangkat straling, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi sekolah dan pembelajaran berbasis digital. Secara keseluruhan sektor pendidikan di Kampung Atapo telah memiliki fondasi dasar yang memadai, namun tetap memerlukan peningkatan sarana, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan lanjutan agar kualitas pembelajaran dapat berkembang lebih baik.

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kampung Atapo berada dalam cakupan Puskesmas Distrik Mimika Barat yang berlokasi di Kampung Apuri. Puskesmas ini dilengkapi layanan rawat inap dan menjadi pusat rujukan utama bagi seluruh kampung di wilayah distrik, termasuk kampung Atapo. Selain itu di Kampung Atapo tersedia satu posyandu yang menerima kunjungan rutin tenaga kesehatan dari puskesmas setiap tanggal 28 untuk pelayanan kesehatan dasar, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi kesehatan masyarakat.

Puskesmas Distrik Mimika Barat didukung oleh 60 tenaga kesehatan tetap yang terbagi ke dalam dua tim kerja. Setiap tim dipimpin oleh seorang dokter umum yang bertanggung jawab mengatur pelayanan medis, supervisi tenaga kesehatan lainnya, dan memastikan keberlangsungan program kesehatan di seluruh kampung binaan, termasuk kampung Atapo.

Akses menuju puskesmas tergolong sangat mudah karena berada tepat di jalur poros distrik, yaitu Jalan Cenderawasih. Jarak dari Kampung Atapo ke puskesmas yang berjarak 2,1 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit berjalan kaki. Kondisi ini menjadikan layanan kesehatan relatif terjangkau bagi warga, meskipun sebagian masyarakat masih memerlukan motivasi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal.

Kesehatan masyarakat di Kampung Atapo masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kasus gizi buruk dan stunting tetap tinggi akibat pola hidup dan sanitasi yang kurang memadai. Pemantauan status gizi melalui e-PPGBM belum

berjalan optimal karena cakupan penimbangan di posyandu sangat rendah, yakni kurang dari 25% dari target nasional 90%. Selain itu penyakit cacingan dan malaria masih menjadi masalah endemik yang sering dijumpai. Kejadian tuberkulosis (TBC) juga cukup tinggi, dipengaruhi kondisi pemukiman yang padat sehingga memudahkan penularan. Kepatuhan minum obat penderita TBC juga masih rendah, sehingga memperlambat proses penyembuhan dan meningkatkan risiko penularan antar anggota keluarga.

Program imunisasi di Kampung Atapo telah berjalan baik dengan cakupan yang memenuhi standar. Namun program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu digiatkan kembali untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih. Upaya peningkatan gizi balita juga memerlukan pendekatan sosialisasi intensif untuk mengubah persepsi masyarakat, karena banyak orang tua masih menganggap anak yang aktif bermain berarti tidak mengalami masalah kesehatan, padahal secara medis dapat terjadi gangguan pertumbuhan yang tidak terlihat secara kasat mata.

Obat-obatan dan peralatan kesehatan di Puskesmas Distrik Mimika Barat tersedia dengan cukup memadai dan dapat diakses secara gratis. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Atapo masih enggan memanfaatkan layanan puskesmas karena menganggap jaraknya jauh serta ketidakterbiasaan mengikuti prosedur pelayanan Kesehatan (SOP). Beberapa warga juga memiliki persepsi negatif terhadap kompetensi tenaga kesehatan, yang menyebabkan mereka ragu untuk berobat atau mengikuti alur pelayanan yang dianjurkan.

6. Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Kampung Atapo menggantungkan hidup pada kegiatan ekonomi subsisten yang dilakukan secara tradisional. Aktivitas utama meliputi berkebun dalam skala terbatas serta meramu dan mengambil tepung sagu di kawasan dusun atau kepala air yang menjadi sumber pangan penting bagi keluarga. Selain itu warga melakukan penangkapan ikan, udang dan kepiting menggunakan peralatan sederhana seperti jaring dan jala, serta mengumpulkan tambelo sebagai tambahan konsumsi maupun komoditas bernilai ekonomi. Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai buruh di pelabuhan Atapo yang menjadi pusat aktivitas bongkar muat barang. Meski terdapat peluang untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga kini belum ada unit usaha yang berjalan karena

keterbatasan modal, pendampingan, serta belum tersedianya pasar yang dapat menyerap produk kerajinan lokal.

Kampung Atapo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan masih relatif alami. Kawasan hutan bakau menjadi habitat alami bagi berbagai jenis kepiting, udang dan siput yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sungai-sungai di sekitar kampung juga menyediakan ragam ikan air tawar yang dapat ditangkap untuk dikonsumsi maupun dijual. Keberadaan hutan dan dusun sagu menjadi bagian penting pemenuhan kebutuhan pangan dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat mengelola sumber daya alam secara tradisional dan berkelanjutan.

Aktivitas perdagangan di Kampung Atapo masih terbatas, ditandai dengan keberadaan tujuh kios milik penduduk migran yang memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat. Seluruh barang dagangan sangat bergantung pada pasokan dari luar kampung, sehingga harga kebutuhan pokok kerap berfluktuasi. Kampung Atapo belum memiliki pasar lokal, sehingga transaksi ekonomi berlangsung secara informal di kios-kios atau langsung antar warga.

Ketersediaan layanan perbankan melalui Kantor Kas Bank Papua yang berlokasi di Kampung Atapo memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk penarikan bantuan sosial, pembayaran kebutuhan, maupun akses layanan perbankan dasar lainnya. Kehadiran fasilitas ini merupakan modal penting bagi pengembangan ekonomi masyarakat jika dikombinasikan dengan pelatihan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Dermaga Atapo menjadi infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi kampung, berfungsi sebagai lokasi bongkar muat bahan kebutuhan pokok dan material pembangunan. Aktivitas ini semakin intensif seiring program pembangunan yang digiatkan pemerintah distrik dan kabupaten. Namun ketiadaan fasilitas *cold storage* menjadi kendala utama terutama saat hasil tangkapan udang dan kepiting melimpah. Tanpa fasilitas penyimpanan, harga komoditas tersebut menjadi sangat rendah dan dikendalikan oleh pedagang pengumpul, yakni hanya sekitar 50-60% dari harga pasar yang semestinya. Selain itu akses internet di kampung Atapo sangat baik dengan sinyal kuat, namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital. Potensi ini membutuhkan fasilitasi dan pendampingan agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara produktif, terutama untuk pemasaran daring dan pengembangan UMKM lokal.

7. Peribadatan

Kehidupan keagamaan masyarakat Kampung Atapo didukung oleh keberadaan satu gedung gereja Katolik yang terletak di Kampung Migiwia dan menjadi pusat rohani bagi warga yang mayoritas beragama Katolik. Selain itu terdapat sebuah rumah doa yang dibangun secara khusus sebagai tempat devosi kepada Bunda Ratu Rosari dan digunakan dalam kegiatan doa Rosario maupun ibadat devosi lainnya. Di Kampung Atapo sendiri tidak terdapat bangunan masjid, namun warga muslim yang merupakan penduduk migran melakukan ibadah di masjid yang berlokasi di Kampung Kokonau.

Fasilitas tempat ibadah di wilayah ini umumnya dalam kondisi layak. Bangunan gereja Katolik dan masjid di Kampung Kokonau telah dibangun secara permanen sehingga mampu menampung aktivitas ibadah rutin umat. Namun rumah doa Bunda Ratu Rosari yang terletak dalam kampung Atapo masih bersifat non permanen sehingga memerlukan perhatian ke depan agar dapat ditingkatkan menjadi bangunan yang lebih kokoh dan nyaman untuk kegiatan devosi umat.

Aktivitas keagamaan masyarakat berlangsung dengan intensitas tinggi. Umat Katolik mengikuti ibadah misa Minggu secara rutin di Gereja Paroki Maria Bintang Laut, yang juga menjadi lokasi pelaksanaan sekolah minggu bagi anak-anak setiap pekan. Kelompok doa aktif mengadakan ibadat turin dalam komunitas basis (Kombas), termasuk pada momen khusus seperti Bulan Maria (Mei) dan Bulan Rosario (Oktober). Sementara itu umat Islam yang berdomisili di luar Kampung Atapo menjalankan ibadah Jumat di masjid Kampung Kokonau.

Gereja Katolik memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Atapo yang mayoritas beragama Katolik. Selain sebagai pusat spiritual, gereja berkontribusi dalam bidang pendidikan melalui penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan YPPK, mulai dari PAUD/TK, SD hingga SMP. Peran gereja juga terlihat dalam pembinaan moral dan karakter melalui organisasi Orang Muda Katolik (OMK) yang menjadi wadah pengembangan kapasitas diri, kepemimpinan, serta kegiatan sosial-keagamaan bagi kaum muda.

8. Olahraga dan Rekreasi

Kampung Atapo belum memiliki fasilitas olahraga yang berada langsung di dalam wilayah kampung. Sarana yang paling dekat adalah lapangan sepak bola yang

terletak di depan kantor distrik di kampung Kokonau. Namun lapangan tersebut tidak terawat dengan baik karena sering tergenang air laut akibat pasang tinggi, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk aktivitas olahraga maupun kegiatan komunitas. Selain itu pembangunan lapangan futsal permanen juga sedang berlangsung di area depan kantor distrik, namun belum selesai sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Fasilitas rekreasi di Kampung Atapo masih sangat terbatas. Hingga saat ini belum tersedia taman kampung, ruang terbuka publik, maupun spot wisata pantai. Kendati demikian, pemerintah kampung memiliki wacana untuk mengembangkan fasilitas rekreasi sebagai bagian dari visi pembangunan membangun dari kampung ke kota dengan konsep kampung rasa kota. Gagasan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan ruang publik yang layak, nyaman dan dapat diakses seluruh warga di masa mendatang.

Aktivitas kepemudaan di Kampung Atapo berjalan secara sederhana dan belum terorganisir dengan baik. Sanggar seni atau wadah pengembangan kreatifitas belum berfungsi optimal karena keterbatasan dukungan, terutama tidak tersedianya peralatan musik yang memadai. Meskipun demikian semangat generasi muda tetap terlihat dalam berbagai kegiatan komunal yang melibatkan seni, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya sesuai kesempatan yang tersedia.

Kegiatan seremonial dan event kampung umumnya dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia setiap bulan Agustus. Pada momen tersebut, pemerintah kampung dan masyarakat menyelenggarakan perlombaan serta pertandingan olahraga sederhana sebagai ajang kebersamaan dan perayaan nasional. Di luar momentum tersebut, kegiatan berskala kampung belum terbentuk secara rutin karena minimnya fasilitas pendukung.

Kampung Atapo saat ini belum memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Ketiadaan objek daya tarik wisata, minimnya infrastruktur pendukung, serta kondisi geografis yang tidak mendukung mengakibatkan pengembangan desa wisata belum memungkinkan untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Namun peluang pengembangan tetap dapat muncul di masa depan apabila dilakukan perencanaan yang matang dan disertai peningkatan fasilitas dasar yang memadai.

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma "membangun dari kampung ke kota", yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Atapo pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota
Di Kampung Atapo

No.	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Akses air bersih dan sambungan pipa rumah	Sekitar 70% rumah tangga belum tersambung jaringan pipa air sehingga distribusi air bersih belum merata dan kontinuitas layanan belum terjamin.	Penyelesaian sambungan rumah (SR) bagi seluruh rumah tangga, peningkatan kapasitas suplai, dan penjaminan aliran air berkelanjutan.	Dinas PUPR (Cipta Karya), Unit Air Bersih
2.	Hunian layak dan rumah sehat	Sebanyak 56% kepala keluarga masih menumpang di rumah orang tua/kerabat mencerminkan keterbatasan hunian mandiri dan layak.	Pembangunan rumah sehat, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta fasilitasi program stimulan rumah swadaya.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.	Sanitasi layak dan higienis	Fasilitas sanitasi dasar telah tersedia namun kualitas dan tingkat higienitasnya belum merata di seluruh rumah tangga (RT)	Pembangunan jamban sehat, peningkatan sanitasi RT, serta pengelolaan limbah domestik skala sederhana.	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR (Cipta Karya)
4.	Penerangan listrik 24 jam	Layanan listrik kampung masih terbatas 12 jam per hari sehingga membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada malam hari.	Peningkatan daya listrik, perluasan jaringan, serta peralihan layanan menuju operasi 24 jam penuh.	PLN UP3 Timika, Dinas ESDM
5.	Jalan kampung dan konektivitas permukiman	Jalan poros kampung relatif baik namun masih terdapat beberapa ruas jalan lingkungan yang belum tersambung dan drainase belum optimal.	Penyambungan seluruh ruas jalan kampung dan perbaikan drainase untuk mendukung mobilitas warga.	Dinas PUPR
6.	Ruang publik taman kampung	Kawasan sekitar dermaga tambatan perahu belum ditata sebagai ruang terbuka publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.	Penataan taman kampung berbasis ekosistem mangrove sebagai ruang terbuka hijau untuk edukasi lingkungan dan rekreasi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Atapo pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Di kampung Atapo

No.	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Perikanan lokal (ikan, udang, kepiting)	Perikanan menjadi sumber nafkah utama masyarakat Atapo, namun harga komoditas tidak stabil, akses pasar terbatas, dan fasilitas cold storage belum berfungsi optimal akibat keterbatasan modal serta lemahnya rantai distribusi.	Pelatihan penanganan hasil tangkap, optimalisasi pemanfaatan cold storage, penyediaan modal bergulir dan sarana tangkap sederhana, serta fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha.	Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Distrik Mimika Barat
2.	UMKM pangan lokal berbasis sagu	UMKM olahan sagu memiliki potensi ekonomi tinggi namun masih berskala kecil karena keterbatasan alat produksi, pendampingan usaha, dan akses pasar.	Pelatihan pengembangan produk turunan sagu, penyediaan peralatan produksi, penguatan kelembagaan UMKM, fasilitasi legalitas usaha (PIRT/halal), serta perluasan pemasaran melalui marketplace dan jejaring toko modern.	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, DPMK

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju, dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Atapo pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan
Di kampung Atapo

No.	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Kualitas layanan pendidikan MBS berpelayanan publik	Kualitas layanan pendidikan dasar masih terbatas dan belum menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpelayanan publik akibat dominasi guru honorer daerah serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah.	Peningkatan kompetensi dan penataan status guru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, serta pembangunan jembatan penghubung menuju sekolah untuk menjamin akses siswa yang aman.	Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dinas PUPR
2.	Penguatan posyandu dan layanan 1000 HPK	Posyandu di Kampung Atapo masih terbatas dari sisi jumlah dan kapasitas kader, peralatan layanan, serta dukungan gizi sehingga pemantauan 1000 HPK belum optimal.	Peningkatan kapasitas kader posyandu, penyediaan alat pemantauan tumbuh kembang, serta penguatan program gizi bagi ibu hamil dan balita.	Dinas Kesehatan, Puskesmas, DPMK
3.	Pengembangan budaya melalui sanggar seni pemuda	Aktivitas seni dan budaya pemuda masih berjalan secara sederhana tanpa fasilitas dan program pembinaan yang memadai.	Pembangunan atau revitalisasi sanggar seni, penyediaan peralatan seni budaya, serta pelaksanaan pelatihan dan pembinaan rutin bagi pemuda.	Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

BAGIAN V. P E N U T U P

Kampung Atapo Distrik Mimika Barat merupakan komunitas yang kaya akan potensi alam dan budaya, sekaligus menunjukkan dinamika sosial yang khas. Infrastruktur kampung terus dikembangkan untuk mendekati standar kota, mencakup jalan poros dan lingkungan, akses air bersih, penerangan, serta fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau dan sarana pendidikan. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, terutama terkait hunian layak, sanitasi, dan akses terhadap layanan dasar, yang menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi dan sumber daya manusia, masyarakat Kampung Atapo memiliki potensi produktif yang besar, khususnya pada sektor perikanan lokal dan UMKM berbasis bahan pangan lokal seperti sagu. Penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan modal menjadi hal penting agar potensi ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Di bidang pendidikan dan budaya, pembinaan moral dan spiritual melalui pendidikan keagamaan, serta pengembangan keterampilan dan seni bagi pemuda, menunjukkan upaya menjaga identitas lokal sambil membangun kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, Atapo sebagai kota pelabuhan sedang berada dalam proses transformasi menuju kampung yang modern, layak huni dan produktif, tanpa menghilangkan jati diri serta nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada prinsip membangun dari kampung ke kota dan kampung rasa kota menekankan integrasi antara infrastruktur, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga, Kampung Atapo diharapkan dapat menjadi contoh kampung yang maju, inklusif, dan harmonis antara kemajuan modern dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Barat dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025).* Dinas Dukcapil, Timika

Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*